

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi**

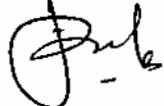
**ZULFA KURNIAWAN
NPM 0706179216**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
KEKHUSUSAN EKONOMI PERKOTAAN DAN WILAYAH
DEPOK
SEPTEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : ZULFA KURNIAWAN
NPM : 0706179216
Tanda Tangan : 
Tanggal : September 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ZULFA KURNIAWAN
NPM : 0706179216
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing Tesis : Dr. DIAH WIDYAWATI (.....)

Penguji Tesis : Dr. SUAHASIL NAZARA (.....)

Ketua Penguji Tesis/
Ketua Program Studi : Dr. ARINDRA A. ZAINAL (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 September 2008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena hanya atas limpahan berkah, rahmat serta pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas dan Bupati Kudus yang telah memberikan beasiswa dan tugas belajar kepada penulis di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Dr. Diah Widyawati, selaku pembimbing yang di tengah kesibukannya telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberi saran yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini;
3. Dr. Arindra A. Zainal selaku Ketua Program dan Ketua Penguji serta Dr. Suahasil Nazara selaku Anggota Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini;
4. Pengelola, Dosen pengajar, dan Staf PPIE-UI baik di Salemba maupun Depok yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia;
5. Ibu tercinta dan Bapak Ibu Mertua, yang dengan penuh kasih sayang telah memberi dukungan moril maupun materiil dan terutama do'a bagi penulis selama mengikuti pendidikan ini. Do'a Orang Tua terutama Ibu sangat luar biasa membantu dalam menyelesaikan studi ini;
6. Keluarga besar Penulis : Mas Wawan, Mbak Nunung, Mas Hemi, Nduk Yayah dengan seluruh istri-suami dan anak-anaknya serta Dik Asrul dan Dik Akham yang telah memberikan dukungan semangat dan do'a agar penulis tetap kuat meninggalkan rumah untuk mengikuti studi ini;

7. Rekan-rekan seperjuangan Kelompok Bappenas PPIE-UI terutama Mas Ekhi, terima kasih atas bimbingannya. Kelompok bercanda dan serius saya, kelompok "spatial auto correlation" : Pak Agung, Kang Rachman, "Aheng" Haryanta, teman-teman genk Ibu Diah : Mbak Febri (yang tidak pernah naik kereta sendirian dan teman nangis di kereta), Mbak Nur, Mbak Diah, Mbak Ermi dan semua teman-teman : Mbak Rita (spesialis tugas bersama : CRS), Pak Din, Pak Bahari, Meindra, Jerry, Mas Budi, Mbak Ummu, Mbak Diana, Kang Yayat, Kang Kaspuri yang telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Teman-teman Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Kudus dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kudus yang telah memberi kesempatan Penulis untuk menunda amanat Musycab dan Musyda, semoga Allah SWT mengampuni dan memberi kesempatan bagi Penulis untuk melanjutkan amanat yang tertunda tersebut;
9. Anak-anakku tersayang yang menjadi spirit dan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini. Ziyad Fikri Izzuddin, maafkan Bapak yang tidak sempat banyak menemani belajar dan bermain, Zahara Hasna Khairunnisa maafkan Bapak Nduk, yang tidak bisa sering menemani di awal-awal kelahiran karena harus berpacu dengan studi ini. Semoga pengorbanan dan kesabaran ananda berdua membawa berkah bagi kebaikan keluarga kita;
10. Yang terakhir dan menjadi bagian terpenting, Istri tercinta Fithrya Kumala Za'imy yang merelakan Penulis menempuh pendidikan di PPIE-UI hingga selesai dan dengan penuh kesabaran mengurus anak-anak dan rumah. Terima kasih telah merelakan menjadi tempat berbagi duka selama menempuh "ujian yang berat" di UI ini dan maafkan apabila perhatian Penulis menjadi berkurang selama ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selesainya studi ini. Tesis ini bukan tujuan akhir melainkan hanya tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, kebaikan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang berkesempatan membaca tulisan ini sangat diharapkan.

Depok, September 2008
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFA KURNIAWAN
NPM : 0706179216
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : September 2008

Yang menyatakan,



(ZULFA KURNIAWAN)

ABSTRAK

Nama : ZULFA KURNIAWAN
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Di Pulau Jawa hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kami mengikutsertakan kapital, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan input lainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pemerintah dengan total pengeluaran pemerintah dalam nilai riil. Kapital dengan realisasi kredit investasi dan modal kerja dari bank umum dalam nilai riil serta ketersediaan infrastruktur (listrik dan air). Tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia dengan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel model fixed effect dengan struktur heterokedastik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Namun demikian, apabila dilakukan pengelompokan antar daerah pesisir dengan non pesisir, tidak terdapat perbedaan efek individu antar daerah tersebut.

Kata kunci :

Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Kapital, Tenaga Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Name : ZULFA KURNIAWAN
Program Study : Postgraduate Program in Economics
Title : The Effect of Local Government Expenditure to Economic Growth in Regency/Municipality of Central Java

The economic growth of Central Java period 2002-2006 to indicate its growth average is under national growth average. In the Java Island only Central Java and Yogyakarta which under under average national growth. The purpose of this research is to know relation between local government expenditure and analyze its influence to economic growth of regency/municipality in Central Java. In studying influenced of local government expenditure to the economic growth, we participate capital, labour and quality of human resources as control variable. Government expenditure growth and other its input predictable increase the economic growth of regencies/municipalities in Central Java.

This research applies data of 35 regencies/municipalities in Central Java for period of 2001-2006 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is being near with Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, government expenditure with total of government expenditure in real value. Capital with realization of investment credit and working capital from commercial banks in real value and availability of infrastructure (electricity and water). Labour with total of labour and quality of human resources with the percentage population 10 years of age and over by minimum education attainment senior high school. The estimation method applied panel data fixed effect model with heterokedastic structure.

The result of research concludes that government expenditure, capital, labour and quality of human has the positive effect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in Central Java. Result the estimation of individual effect indicating heterogeneity of between regency/municipality in Central Java. That is expressing that there are factors or other variable which is owned by an area but it isn't by other area. However, as a classify between coastal area with non-coastal area individual effect between that's area isn't differs.

Keywords :

Economic growth, Government expenditure, Capital, Labour, Quality of human resources

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teori dan Hipotesa Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
2. PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH	11
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	11
2.2 Perkembangan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	16
2.2.1 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.2.2 Kapital.....	21
2.2.3 Tenaga Kerja	23
2.2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	26
2.3 Permasalahan Yang Dihadapi dan Kebijakan Pemerintah tentang Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.	27
3. KERANGKA TEORI DAN HIPOTESA.....	30
3.1 Teori Pertumbuhan Neo Klasik	30
3.2 Teori Pertumbuhan Solow.....	32
3.3 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian.....	35
3.4 Penelitian Empiris tentang Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Hipotesa Penelitian.....	40
4. METODE PENELITIAN	45
4.1 Jenis dan Sumber Data	45
4.2 Spesifikasi Model dan Variabel yang Digunakan	46
4.3 Definisi Operasional Variabel.....	47
4.4 Analisa Dengan Regresi Data Panel	49
4.5 Estimasi Regresi Data Panel.....	52
4.5.1 Model Common Effect.....	52
4.5.2 Model Individual Effect	52

4.6	Uji Spesifikasi Model.....	53
4.6.1	Pemilihan Model antara Common Effect dengan Individual Effect	55
4.6.2	Pemilihan Model antara Fixed Effect dan Random Effect..	55
4.6.3	Pemilihan Model Estimator dengan melihat Struktur Varian dan Kovarian dari Residual.....	56
4.7	Pengujian Signifikansi	56
5.	PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN.....	59
5.1	Uji Spesifikasi Model	59
5.2	Uji Signifikansi dan Arah Pengaruh Variabel-Variabel Bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	61
5.3	Pembahasan Hasil Estimasi	63
5.3.1	Analisis Koefisien Variabel-Variabel Bebas Hasil Estimasi	63
5.3.1.1	Hubungan Antara Total Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	63
5.3.1.2	Hubungan Antara Kredit Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	64
5.3.1.3	Hubungan Antara Kredit Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	65
5.3.1.4	Hubungan Antara Ketersediaan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	66
5.3.1.5	Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	67
5.3.1.6	Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	68
5.3.2	Analisis Efek Individu Kabupaten/Kota.....	68
6.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	71
6.1	Kesimpulan	71
6.2	Rekomendasi Kebijakan	73
6.3	Keterbatasan Studi	74
	DAFTAR REFERENSI	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2000-2006.....	12
Gambar 2.2	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2000-2006 Tanpa Migas	14
Gambar 2.3	Kontribusi 6 Kabupaten/Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2000-2006.....	15
Gambar 2.4	Jumlah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000-2006	19
Gambar 2.5	Proporsi Pengeluaran Rutin/Aparatur dan Pengeluaran Pembangunan/Publik terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000-2006.....	20
Gambar 2.6	Data Penyaluran Kredit Modal Kerja dan Investasi di Jawa Tengah Tahun 2000-2006.....	23
Gambar 2.7	Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2000-2006...	24
Gambar 2.8	Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2000-2006	25
Gambar 2.9	Prosentase Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas di Jawa Tengah Tahun 2000-2006	26
Gambar 3.1	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi tanpa Perubahan Teknologi	32
Gambar 3.2	Model Perpotongan Keynesian, IS-LM, Kurva Permintaan Aggregate dan Keseimbangan AD-AS.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia periode 2002-2006.....	13
Tabel 2.2	Struktur Ekonomi Jawa Tengah 2001-2006 atas Dasar Harga Berlaku (persen)	16
Tabel 2.3	Rata-rata Persentase Pengeluaran Pemerintah 2000-2006.....	18
Tabel 2.4	Rata-rata Persentase PMTDB Propinsi 2002-2006.....	22
Tabel 4.1	Variabel dan Sumber Data serta Pengaruhnya Yang Diharapkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	49
Tabel 5.1	Hasil Regresi	61
Tabel 5.2	Efek Individu Kabupaten/Kota.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Estimasi dengan Model *Common Effect*
- Lampiran 2. Hasil Estimasi dengan Model *Random Effects*
- Lampiran 3. Hasil Estimasi dengan Model *Fixed Effects*
- Lampiran 4. Hasil Uji F (Individual Effect atau Common Effect)
- Lampiran 5. Hasil Uji Hausman (Fixed Effect atau Random Effect)
- Lampiran 6. Hasil Uji LM (Struktur var-cov residual homokedastik atau heterokedastik)
- Lampiran 7. Hasil Estimasi *Fixed Effects dengan Cross Section Weights*
- Lampiran 8. Hasil Uji Angka Rata-rata (mean) antara Daerah Pesisir dengan Non-pesisir

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang beberapa masalah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yang akan memaparkan tentang pengeluaran pemerintah di era otonomi daerah. Selain itu diuraikan juga beberapa variable yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah. Selanjutnya secara ringkas akan diuraikan juga tentang perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian sebelumnya, hipotesa dan metodologi penelitian serta bagaimana sistematika penulisan dari penelitian ini secara keseluruhan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah utama persoalan makroekonomi yang harus dihadapi oleh semua negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2004) adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ukuran kuantitatif tersebut dinyatakan dalam prosentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam kegiatan perekonomian riil, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Perkembangan fisik tersebut antara lain berupa penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara karena dengan membaiknya pertumbuhan ekonominya, berarti terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, infrastruktur dan juga barang modal. Hal tersebut akan mendatangkan imbal balik bagi pemilik faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat dan itu berarti akan terjadi peningkatan standar taraf hidup.

masyarakatnya. Di dalam konteks regional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diperlukan bagi suatu daerah untuk mengukur kinerja pembangunan perekonomiannya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan yang berarti juga meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dari tahun ke tahun, data Produk Domestik Regional Bruto yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan, karena dengan menggunakan PDRB atas harga konstan pengaruh perubahan harga terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto telah dihilangkan.

Tesis ini mengaplikasikan model pertumbuhan nasional dalam konteks regional. Hal ini dimungkinkan karena setiap region merupakan daerah administratif sendiri. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia) yang terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Batas wilayah Jawa Tengah adalah : sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Propinsi Jawa Timur, sebelah selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia, serta sebelah barat Propinsi Jawa Barat. Sehingga Propinsi Jawa Tengah apabila dilihat dengan menggunakan konsep Produk Domestik Regional Bruto dan satu kesatuan administratif, dapat dikaji dan dianalisa sebagai aktivitas perekonomian yang independen dan tertutup.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, secara nasional posisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 apabila dibandingkan dengan propinsi lain dengan tolok ukur rata-rata pertumbuhan nasional selama periode tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,20 persen yang berarti masih berada sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,24 persen atau selisih sebesar 0,04 persen. Dan di

Pulau Jawa hanya Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang rata-rata pertumbuhannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah faktor pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah yang sekaligus mencerminkan arah kebijakan perekonomian pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mardiasmo (1999) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja. Pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang digambarkan dalam APBN dan APBD pada prinsipnya bertujuan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada pengeluaran pemerintah daerah yaitu besarnya realisasi pengeluaran pemerintah daerah yang didanai dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tertentu. Pengeluaran pemerintah seperti yang tercermin APBD tersebut dibagi dalam dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin/aparatur dan pengeluaran pembangunan/publik.

Pengeluaran rutin/aparatur adalah untuk keperluan-keperluan seperti gaji pegawai sehingga sifatnya bukanlah untuk investasi tetapi lebih untuk operasionalisasi pemerintahan. Pengeluaran rutin/aparatur ini mempunyai peranan dan fungsi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan

pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan. Adapun pengeluaran pembangunan/publik adalah pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai investasi sektor publik yang terdiri dari sejumlah sektor. Pengeluaran pembangunan/publik tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Anggaran pembangunan/publik juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selama ini, implikasi dari kebijakan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun studi empirisnya yang juga masih terus berkembang. Pada awalnya yang lebih diperhatikan adalah mengenai kuantitas pengeluaran pemerintah dan efektifitas maupun efisiensinya, namun pada tahap selanjutnya aspek-aspek lain dari kebijakan fiskal tersebut dirasa perlu juga untuk diamati.

Di Indonesia kajian tentang pengeluaran pemerintah daerah menjadi suatu kajian yang cukup menarik seiring dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya undang-undang di bidang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu diterbitkan pula undang-undang tentang desentralisasi fiskal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lahirnya kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan tonggak penting pembaharuan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut otonomi daerah di Indonesia secara efektif diimplementasikan sejak 1 Januari 2001. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian dan evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah selama lima tahun, telah dilakukan penyempurnaan atas UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, UU Nomor 25 Tahun 1999 disempurnakan menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Bappenas, 2003).

Pemikiran yang mendasari kebijakan penyerahan kewenangan ke daerah, adalah keyakinan bahwa pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan rakyat, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya. Aspirasi rakyat akan mudah dan cepat terekam, kemudian diterjemahkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi aspirasi rakyat tersebut. Sejalan dengan peningkatan anggaran yang dikelola daerah, hal itu perlu diikuti peningkatan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola, memanfaatkan secara optimal, dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja secara baik.

Pada era otonomi daerah ini dimana setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan anggarannya pada daerahnya masing-masing, masalah pengalokasian pengeluaran pemerintah merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus dapat menentukan seberapa besar proporsi masing-masing sektor agar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan efisien dan sekaligus efektif. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan juga untuk menunjang upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan tiap-tiap kabupaten/kota tentu tidak sama sesuai dengan skala prioritas dan kondisi yang ada di masing-masing kabupaten/kota antara lain meliputi faktor sumber daya manusia pengelolanya, sumber-sumber potensial keuangannya, sumber daya alam serta sosial dan budaya. Namun demikian prinsip pola pengeluaran pemerintah pada umumnya hampir sama yaitu sesuai dengan prinsip pemerintah sebagai pelayan publik.

Apabila dilihat dari rata-rata persentase pengeluaran pemerintah Jawa Tengah dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah seluruh propinsi di Indonesia atas dasar harga konstan 2000 selama periode 2002-2006, maka pengeluaran pemerintah Propinsi Jawa Tengah tergolong cukup tinggi yaitu 11,37 persen. Sehingga dari sisi pengeluaran pemerintah, Jawa Tengah berada hanya di bawah Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan besarnya pengeluaran pemerintah (realisasi APBN dan APBD propinsi dan kabupaten/kota) Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor modal (modal). Apabila dilihat dari sisi pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) atas dasar harga konstan 2000, rata-rata persentase PMTDB Jawa Tengah dari keseluruhan PMTDB propinsi di Indonesia selama tahun 2002-2006 apabila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,45 persen. Namun apabila dilihat dari propinsi lain di Pulau Jawa, maka Jawa Tengah hanya berada di atas DI Yogyakarta dan Banten.

Selain pengeluaran pemerintah dan modal, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor tenaga kerja. Selama periode penelitian, pertumbuhan tenaga kerja (tenaga kerja) di Jawa Tengah mengalami pasang surut seiring dengan naik turunnya kondisi perekonomian regional di Jawa Tengah. Dimana jumlah tenaga kerja tertinggi selama periode penelitian adalah pada tahun 2005 sebesar 15.655.303 tenaga kerja dan paling rendah pada tahun 2000 sebesar 14.491.222 tenaga kerja dengan jumlah terbesar masih didominasi tenaga kerja di sektor pertanian, yang jumlahnya pada tahun 2006 sebesar 36,57 persen yang berarti menurun dari komposisi tahun 2000 yang sebesar 42,34 persen, kemudian disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri.

Kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan juga merupakan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berusia 10 tahun ke atas, selama periode penelitian tahun 2000-2006 rata-rata masih didominasi oleh pendidikan tingkat dasar (Sekolah Dasar) yaitu sebesar 69,29 persen, SMP sebesar 15,58 persen dan SMA ke atas sebesar 15,13 persen.

Bertitik tolak dari berbagai hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan faktor-faktor yang berkaitan lainnya : modal, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah observasi awal dalam membuat perumusan-perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah ?
2. Bagaimanakah hubungan antara variable lainnya : tenaga kerja, kapital dan kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah ?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan variable bebas lainnya tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- b. Untuk menganalisis hubungan antara variable lainnya : tenaga kerja, kapital dan kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah tersebut dan variable-variabel bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah bagi perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka menyusun rencana dan kebijakan ekonomi daerah di masa yang akan datang.
- b. Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi regional, khususnya pengembangan model penggunaan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

1.4 Kerangka Teori dan Hipotesa Penelitian

Kerangka teori yang digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah dan variabel bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah dengan menggunakan kurva permintaan agregat (AD) yang diturunkan dari kurva IS-LM yang merupakan interpretasi dari teori Keynes. Selain itu juga dengan menggunakan pertumbuhan solow yang mengasumsikan bahwa model terdiri dari variabel output (Y) dan variabel input terdiri dari modal (K), tenaga kerja (L) dan pengetahuan (A) serta dari Romer (2006) yang menyatakan bahwa modal manusia (H) setiap tenaga kerja tergantung pada tahun-tahun pendidikan yang diikutinya.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Landau (1986), Lin (1994), Barro (1990), Kweka dan Morrissey (2000) dengan beberapa variabel dan kesimpulan yang berbeda. Di Indonesia, Effendi (2006) dan Hariyati (2007) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang menyimpulkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Model ekonomi yang digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan beberapa variabel lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

$$Y = f(PP, K, L, H) \quad (1.1)$$

Dimana dari model tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah (Y) merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah (PP), kapital (K), tenaga kerja (L) dan sumber daya manusia (H). Dalam penelitian ini untuk menghindari adanya persamaan identitas karena pengaruh langsung dari pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap nilai PDRB atas harga riil, maka diduga bahwa pengeluaran pemerintah, kapital (kredit investasi dan kredit modal kerja) yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah merupakan pengeluaran dan realisasi tahun sebelumnya (t-1).

Mengacu pada kerangka teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis mempunyai hipotesis sebagai berikut :

- Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Kredit investasi dan modal kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Ketersediaan infrastruktur (jaringan listrik dan air) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

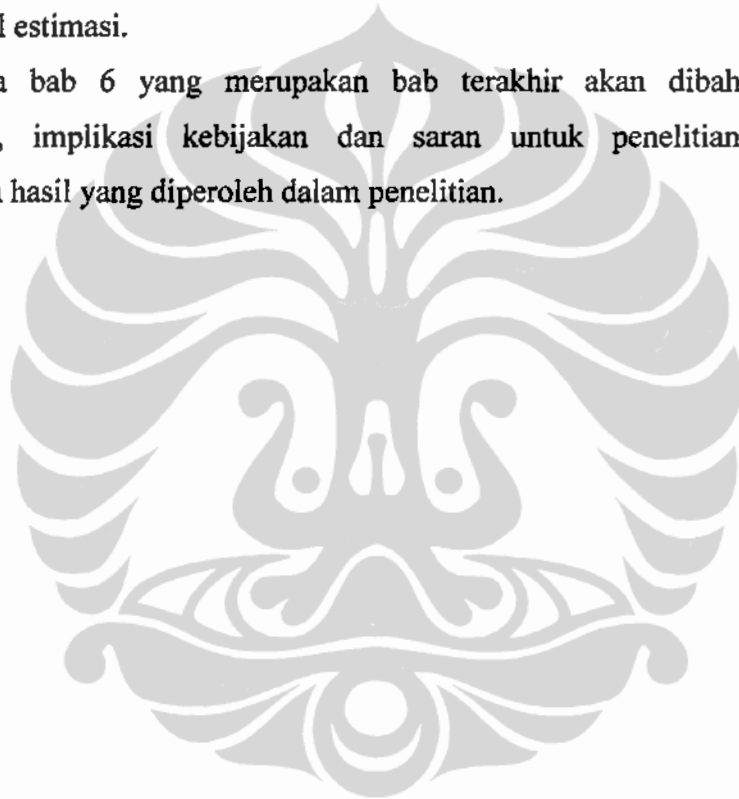
Setelah bab pendahuluan, bab berikutnya adalah bab 2 yang menguraikan mengenai pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut meliputi pengeluaran pemerintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu dibahas juga tentang kebijakan yang diambil pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab selanjutnya yaitu bab 3 akan diuraikan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teori tentang pertumbuhan ekonomi dan peranan pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian. Teori pertumbuhan ekonomi yang akan dibahas adalah teori pertumbuhan neo-klasik dan solow dengan beberapa kesamaan maupun perbedaannya. Selanjutnya diuraikan tentang peranan pemerintah dalam perekonomian yang dilakukan melalui kebijakan fiskal melalui kurva agregat demand (AD) dan kurva IS-LM. Selain itu akan direview penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pada bagian akhir bab 3 berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya akan disampaikan hipotesa-hipotesa yang akan diuji.

Pembahasan berikutnya dalam bab 4 berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan yang meliputi data dan sumber data yang digunakan, spesifikasi model dan variable penelitian serta definisi operasional variable. Selanjutnya juga akan diuraikan tentang proses estimasi yang dilakukan dengan data panel. Proses tersebut meliputi tentang model estimasi data panel, pemilihan model estimasi dalam data panel dan uji signifikansi terhadap variable penelitian.

Setelah itu, pada bab 5 akan diuraikan mengenai hasil pemilihan model estimasi dalam data panel dan pengujian signifikansi serta pembahasan dan analisa hasil estimasi.

Pada bab 6 yang merupakan bab terakhir akan dibahas mengenai kesimpulan, implikasi kebijakan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian.



BAB 2

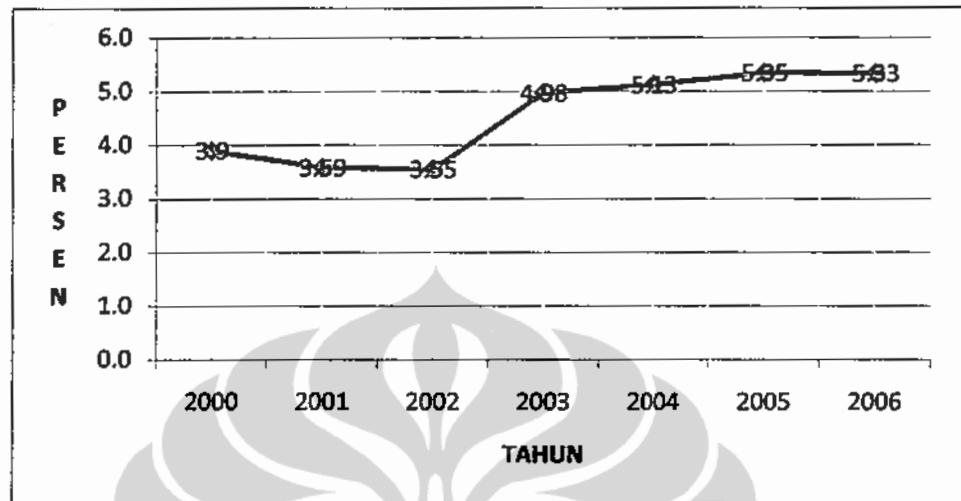
PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH

Bab ini menguraikan mengenai pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama periode penelitian tahun 2000-2006. Pembahasan meliputi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah, perkembangan pengeluaran pemerintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang diambil pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Perekonomian regional Jawa Tengah pada periode penelitian tahun 2000-2006 mengalami pasang surut yang berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian regional. Selama periode 2000-2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun berkisar antara 3,5–5,5 persen. Pada tahun 2000 perekonomian tumbuh sebesar 3,9 persen, namun pertumbuhan ekonomi tahun 2001 lebih lambat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,59 persen. Tahun 2002 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,55 persen yang berarti juga mengalami pelambatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04 persen. Namun pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat dari tahun 2002 yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 perekonomian tumbuh sebesar 5,13 persen dan 5,35 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah agak menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 5,33 persen. Selama periode tersebut, hanya pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,98 persen. Sedangkan pada tahun sebelum dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk

melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode 2000-2006 tampak dari gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2000-2006

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sedangkan secara nasional posisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 apabila dibandingkan dengan propinsi lain dengan tolok ukur rata-rata pertumbuhan nasional selama periode tersebut yaitu sebesar 5,24 persen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia periode 2002-2006

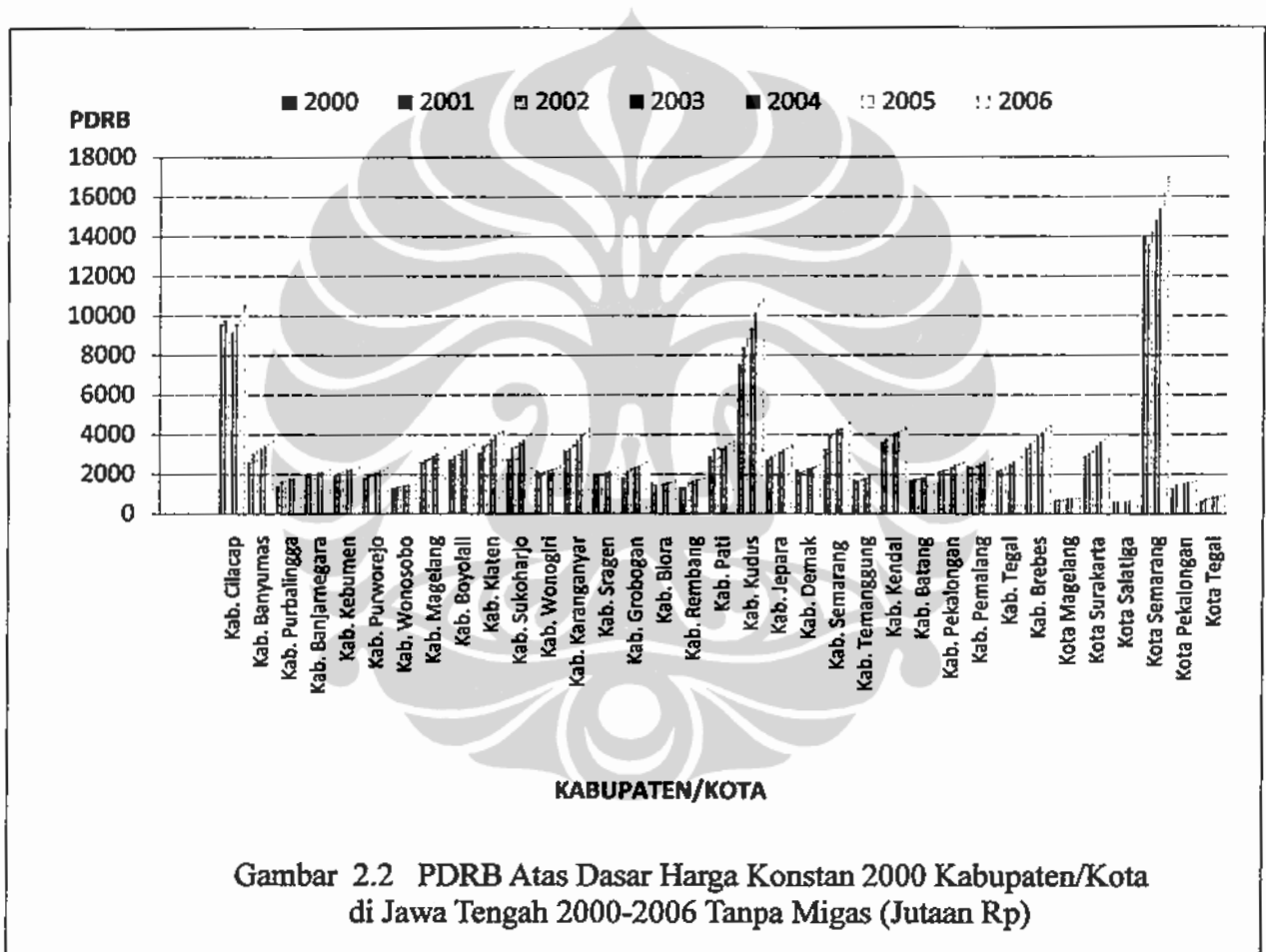
No	Propinsi	Pertumbuhan ekonomi	
		Di bawah Nasional	Di atas Nasional
1.	NAD	-2,96	
2.	Sumatera Utara		5,55
3.	Sumater Barat		5,65
4.	Riau	4,14	
5.	Jambi		5,46
6.	Sumsel	4,59	
7.	Bengkulu		5,6
8.	Lampung	4,94	
9.	Kep. Ba-Bel		5,54
10.	Kep. Riau	4,95	
11.	DKI Jakarta		5,72
12.	Jawa Barat		5,27
13.	Jawa Tengah	5,20	
14.	DI Yogyakarta	4,53	
15.	Jawa Timur		5,56
16.	Banten		5,53
17.	Bali	4,76	
18.	Kalbar	4,46	
19.	Kalteng		5,55
20.	Kalsel	4,80	
21.	Kaltim	2,40	
22.	Sulawesi Utara	4,63	
23.	Sulawesi Tengah		7,22
24.	Sulawesi Selatan		5,83
25.	Sultra		7,52
26.	Gorontalo		7,07
27.	Sulbar	1,75	
28.	NTB	3,49	
29.	NTT	4,46	
30.	Maluku	4,84	
31.	Maluku Utara	4,78	
32.	Irian Jaya Barat		6,61
33.	Papua	-0,91	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih berada sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yaitu selisih sebesar 0,04 persen. Dan di Pulau Jawa hanya

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang rata-rata pertumbuhannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional.

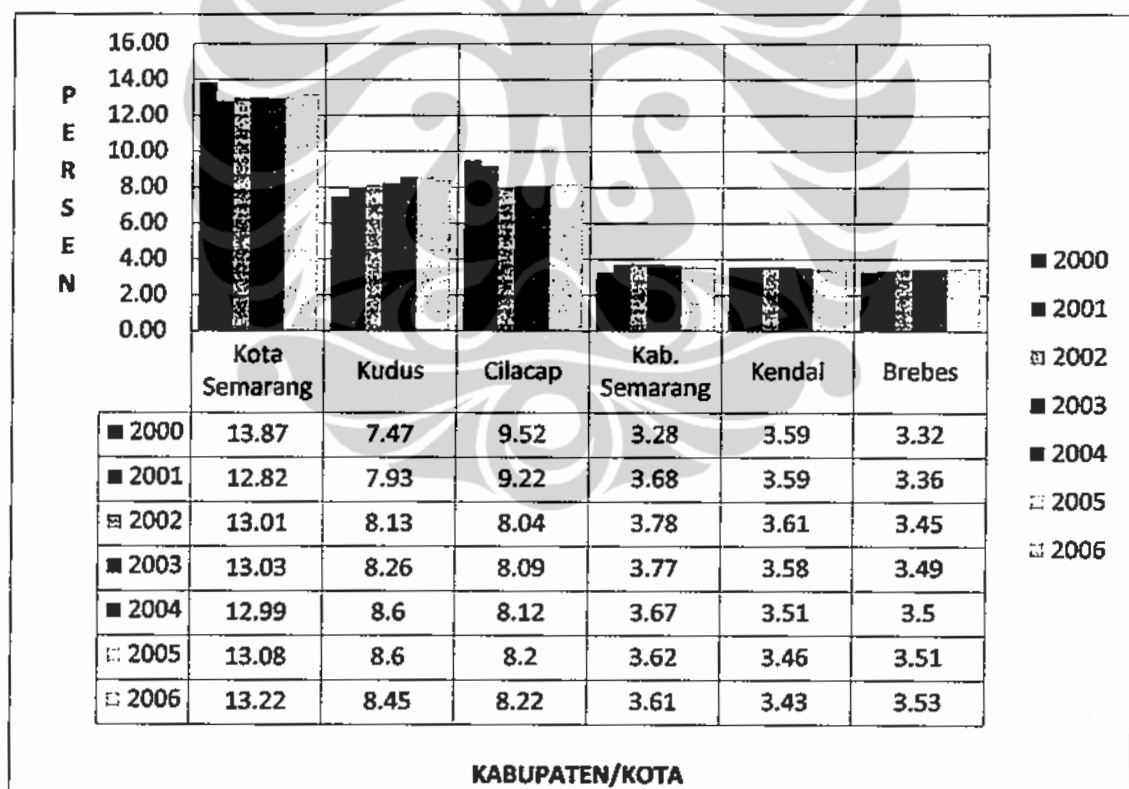
Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode penelitian mengalami perkembangan yang relatif membaik, dimana pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota tumbuh positif. Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi nampak dari gambar 2.2 di bawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Dari gambar 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata semua kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun demikian beberapa kabupaten/kota juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Apabila dilihat dari kontribusi kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah maka dapat terlihat bahwa komposisi 6 (enam) kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cenderung tidak mengalami perubahan. Pada periode 2000-2006 kontribusi 6 (enam) kabupaten/kota tersebut berkisar 40-41 persen dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sementara sisanya berasal dari kontribusi 29 kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Pada tahun 2006, berdasarkan harga konstan tahun 2000 tanpa migas, 6 (tujuh) kabupaten/kota tersebut memberikan kontribusi sebesar 40,46 persen atau turun sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun 2005. Gambar 2.3 berikut ini memaparkan kontribusi 6 (enam) kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode tahun 2000-2006 :



Gambar 2.3 Kontribusi 6 Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2000-2006

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sedangkan apabila dilihat dari struktur ekonomi di Jawa Tengah, dalam periode 2000-2006 sektor industri dan pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan di Jawa Tengah yang ditandai dengan sumbangannya terhadap total PDRB yang berkisar di atas angka 30 persen. Sedangkan sektor terbesar selanjutnya adalah perdagangan, hotel dan restoran dan disusul sektor pertanian. Hanya pada tahun 2006 terjadi pergeseran struktur ekonomi, dimana pertanian yang selama tahun 2000-2005 memberikan kontribusi terbesar ketiga, pada tahun 2006 memberikan kontribusi terbesar kedua menggeser perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang memberikan kontribusi terkecil selama periode penelitian adalah sektor pertambangan dan penggalian. Tabel 2.2 berikut ini memperlihatkan struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2000-2006 :

Tabel 2.2 Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2001-2006 atas Dasar Harga Berlaku (persen)

No	SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	22,26	22,15	19,67	19,90	19,11	20,34
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,97	0,93	0,97	0,96	0,97	1,02
3.	Industri Pengolahan	30,96	31,70	32,60	32,64	33,71	32,85
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,77	1,02	1,17	1,22	1,20	1,12
5.	Bangunan	4,68	4,87	5,17	5,63	5,77	5,66
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,74	20,95	20,75	20,09	19,92	19,63
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,69	5,21	5,76	5,67	5,91	5,96
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,73	3,80	3,75	3,73	3,56	3,40
9.	Jasa-jasa	10,19	9,38	10,16	10,16	9,85	10,02

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.2 Perkembangan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan menurut ahli ekonomi neo-klasik bahwa faktor produksi yang menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah faktor produksi modal dan tenaga kerja. Sementara itu Romer (2006) menyatakan bahwa

sama halnya dengan modal fisik maka modal manusia juga dilihat sebagai variabel yang bersifat eksogen. Model ini mengasumsikan bahwa modal manusia setiap tenaga kerja tergantung pada tahun-tahun pendidikan yang diikutinya. Hasil penelitian empiris John Baffers dan Anwar Syah (1998) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja.

Uraian dalam bagian ini akan menjelaskan perkembangan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah meliputi pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, kapital dan kualitas sumber daya manusia pada periode penelitian tahun 2000-2006.

2.2.1. Pengeluaran Pemerintah

Kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Ada beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran pemerintah tersebut, antara lain sektor produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan keseimbangan perekonomian (Brata dan Trihartanto, 2004). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mardiasmo (1999) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Selama tahun 2002-2006 apabila dilihat dari total pengeluaran pemerintah yang merupakan keseluruhan pengeluaran pemerintah yang terealisasi di Propinsi Jawa Tengah baik berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), propinsi (APBD Propinsi) maupun kabupaten/kota (APBD Kab/Kota) rata-rata persentase pengeluaran pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan rata-rata total pengeluaran pemerintah seluruh propinsi di Indonesia yang dilihat atas dasar

harga konstan 2000 cukup tinggi yaitu 11,37 persen. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Rata-rata Persentase Pengeluaran Pemerintah 2002-2006

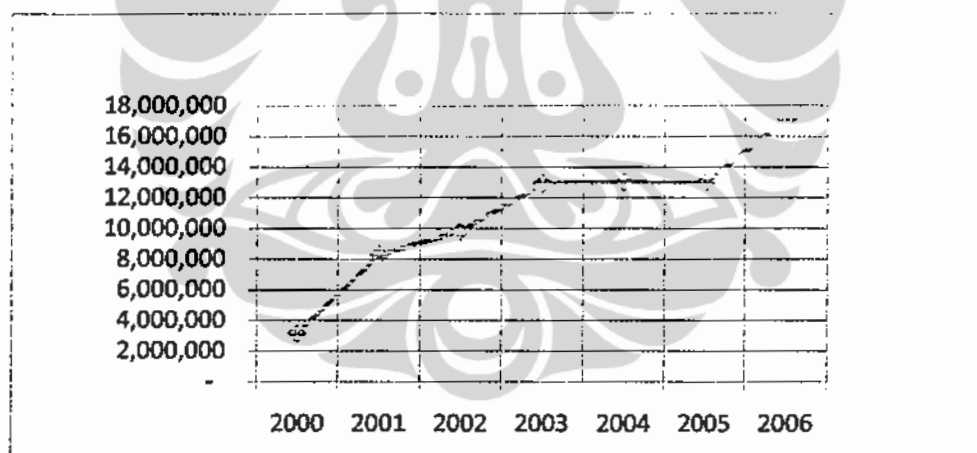
No	Propinsi	Rata-rata Persentase Pengeluaran Pemerintah 2002-2006
1.	NAD	4.53
2.	Sumatera Utara	5.11
3.	Sumater Barat	2.72
4.	Riau	2.91
5.	Jambi	1.71
6.	Sumsel	2.71
7.	Bengkulu	0.71
8.	Lampung	3.04
9.	Kep. Ba-Bel	0.47
10.	Kep. Riau	0.58
11.	DKI Jakarta	10.40
12.	Jawa Barat	11.42
13.	Jawa Tengah	11.37
14.	DI Yogyakarta	2.33
15.	Jawa Timur	11.52
16.	Banten	1.79
17.	Bali	1.35
18.	Kalbar	1.95
19.	Kalteng	1.71
20.	Kalsel	2.09
21.	Kaltim	3.17
22.	Sulawesi Utara	2.23
23.	Sulawesi Tengah	1.30
24.	Sulawesi Selatan	4.68
25.	Sultra	1.28
26.	Gorontalo	0.54
27.	Sulbar	0.17
28.	NTB	1.55
29.	NTT	1.59
30.	Maluku	0.59
31.	Maluku Utara	0.40
32.	Irian Jaya Barat	0.53
33.	Papua	1.54

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa apabila dilihat dari rata-rata persentase pengeluaran pemerintah propinsi di Indonesia secara keseluruhan,

Jawa Tengah berada pada posisi cukup tinggi yaitu berada di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan besarnya keseluruhan pengeluaran pemerintah (APBN, APBD propinsi, APBD kabupaten/kota) yang terealisasi di Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia.

Sedangkan dari sisi perkembangan total realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota) di Jawa Tengah selama periode penelitian ternyata juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota selama periode 2000-2006 tersebut paling tinggi terjadi pada tahun 2001, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis kota/kabupaten mulai dilaksanakan. Sehingga anggaran pengeluaran pemerintah kabupaten/kota mengalami peningkatan secara drastis karena adanya penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusannya sendiri. Gambar 2.4 berikut ini menyajikan perkembangan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2000-2006 :

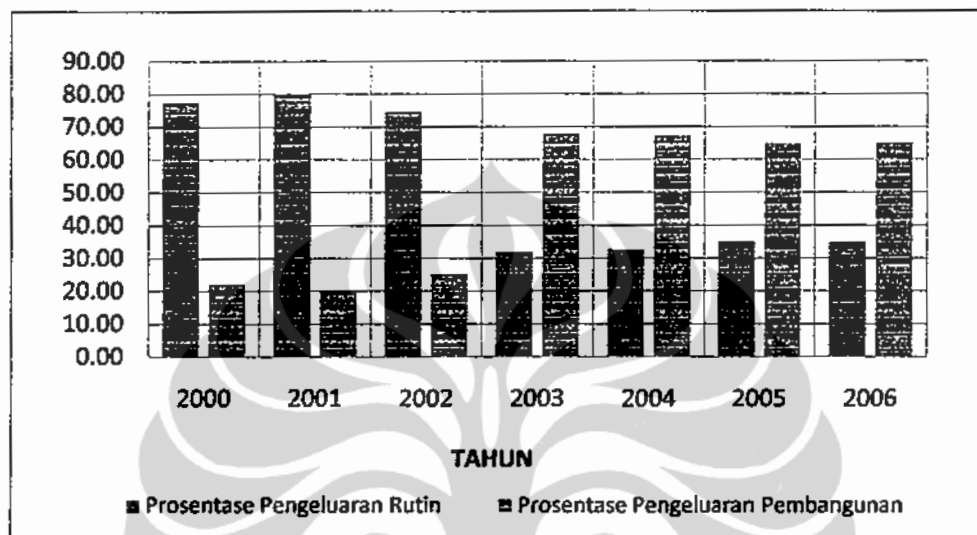


Gambar 2.4 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000-2006

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin/aparatur dan pengeluaran pembangunan/publik, maka dapat terlihat bahwa pada periode 2000-2002 dimana pada saat pengelompokan jenis pengeluaran pemerintah terdiri dari rutin dan pembangunan, proporsi pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan proporsi

pengeluaran pembangunan. Namun pada periode selanjutnya tahun 2003-2006 pada saat jenis pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi pengeluaran aparatur dan publik maka proporsi tersebut menjadi pengeluaran publik lebih besar dari pengeluaran aparatur. Hal ini dapat terlihat sebagaimana gambar 2.5 berikut ini :



Gambar 2.5 Proporsi Pengeluaran Rutin/Aparatur dan Pengeluaran Pembangunan/Publik terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2000-2006

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali).

Perubahan proporsi pengeluaran pemerintah dari semula didominasi oleh pengeluaran rutin menjadi pengeluaran pembangunan sebagaimana terlihat dari gambar 2.5 tersebut selain dikarenakan adanya perubahan pengelompokan jenis belanja pemerintah dari rutin menjadi aparatur dan pembangunan menjadi publik yang menyebabkan terjadinya pergeseran beberapa jenis belanja yang semula termasuk kelompok belanja rutin menjadi kelompok belanja publik dan demikian juga sebaliknya dari semula termasuk kelompok belanja pembangunan menjadi kelompok belanja aparatur juga menunjukkan adanya perubahan struktur belanja pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pembangunan/publik merupakan pengeluaran yang diperuntukkan bagi sektor publik untuk kepentingan masyarakat secara langsung, berbeda dengan pengeluaran rutin/aparatur yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga hal ini menunjukkan sudah

adanya usaha untuk lebih dapat melayani dan memenuhi kepentingan publik dari pada kepentingan belanja aparatur pemerintah.

Pada pembahasan selanjutnya, dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah didekati dengan besarnya realisasi total pengeluaran pemerintah yang digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang didanai dan tercantum dalam APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2000-2005 dalam satuan nilai rupiah.

2.2.2. Kapital

Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahap ini pemerintah harus menginvestasikan pengeluarannya pada sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pengeluaran investasi pemerintah ini dilakukan melalui belanja pemerintah yaitu pada belanja pembangunan.

Namun pada perkembangan selanjutnya, dimana perekonomian suatu negara sudah berkembang dengan baik, peran modal swasta menjadi sangat penting dan porsinya semakin membesar daripada pengeluaran investasi oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan swasta lebih mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan peningkatan modal dibandingkan dengan pemerintah.

Secara keseluruhan apabila dilihat dari pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) atas dasar harga konstan 2000, rata-rata persentase PMTDB Jawa Tengah dari keseluruhan PMTDB propinsi di Indonesia selama tahun 2002-2006 apabila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,45 persen. Namun demikian apabila dilihat dari propinsi lain yang terdapat di Pulau Jawa, maka Jawa Tengah hanya berada di atas Propinsi DI Yogyakarta dan Banten. Berikut ini tabel 2.4 tentang rata-rata persentase PMTDB seluruh propinsi di Indonesia periode 2002-2006 :

Tabel 2.4 Rata-rata Persentase PMTDB Propinsi 2002-2006

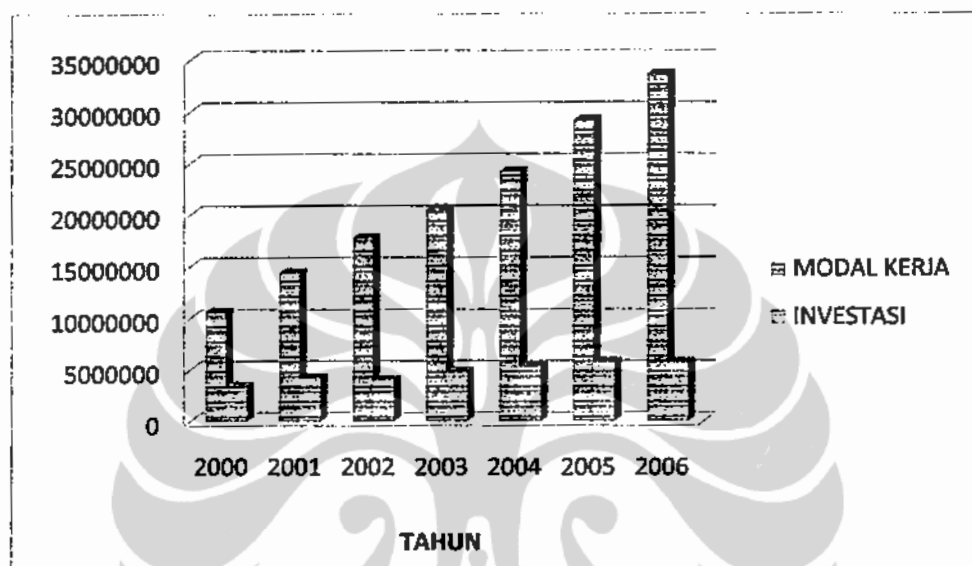
No	Propinsi	Rata-rata Persentase PMTDB Propinsi Tahun 2002-2006
1.	NAD	1.26
2.	Sumatera Utara	4.13
3.	Sumater Barat	1.54
4.	Riau	5.85
5.	Jambi	0.53
6.	Sumsel	2.90
7.	Bengkulu	0.15
8.	Lampung	1.41
9.	Kep. Ba-Bel	0.37
10.	Kep. Riau	2.75
11.	DKI Jakarta	27.23
12.	Jawa Barat	11.32
13.	Jawa Tengah	6.45
14.	DI Yogyakarta	1.37
15.	Jawa Timur	13.29
16.	Banten	3.66
17.	Bali	0.81
18.	Kalbar	1.97
19.	Kalteng	1.37
20.	Kalsel	0.64
21.	Kaltim	3.92
22.	Sulawesi Utara	0.65
23.	Sulawesi Tengah	0.58
24.	Sulawesi Selatan	1.80
25.	Sultra	0.51
26.	Gorontalo	0.18
27.	Sulbar	0.03
28.	NTB	1.05
29.	NTT	0.59
30.	Maluku	0.03
31.	Maluku Utara	0.02
32.	Irian Jaya Barat	0.46
33.	Papua	1.20

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sedangkan apabila dilihat dari data kredit yang diisalurkan melalui bank umum menurut penggunaan modal kerja dan investasi kepada pihak ketiga bukan bank berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja, sedangkan kredit investasi adalah kredit

jangka menengah/panjang yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, ekspansi, modernisasi dan atau pendirian proyek baru.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah penyaluran kredit modal kerja dan investasi dapat di lihat pada gambar 2.6 berikut ini :



Gambar 2.6 Data Penyaluran Kredit Modal Kerja dan Investasi di Jawa Tengah Tahun 2000-2006

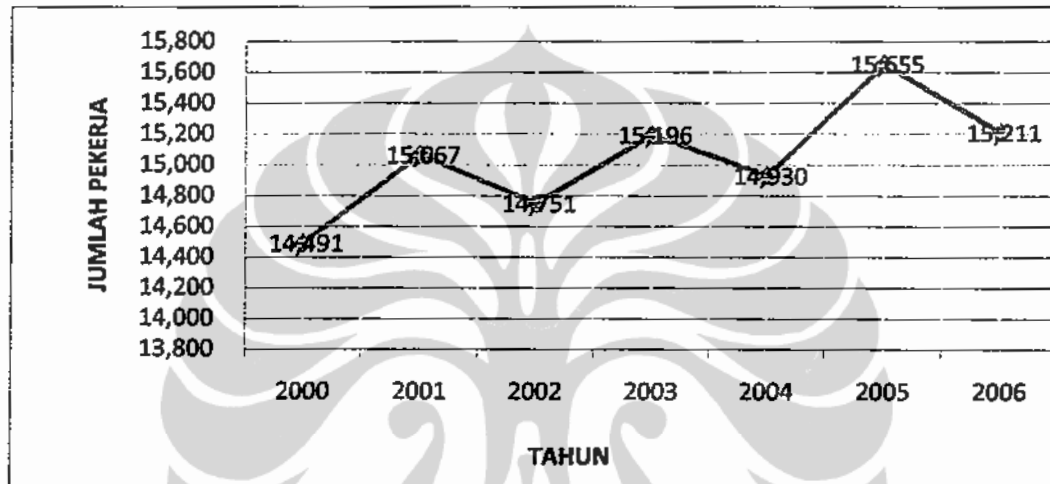
Sumber : Bank Indonesia (telah diolah kembali)

Dengan adanya peningkatan permintaan terhadap kredit untuk keperluan investasi dan modal kerja tersebut diharapkan akan meningkatkan produksi sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

2.2.3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap penduduk usia kerja dan pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas mereka yang bekerja dan

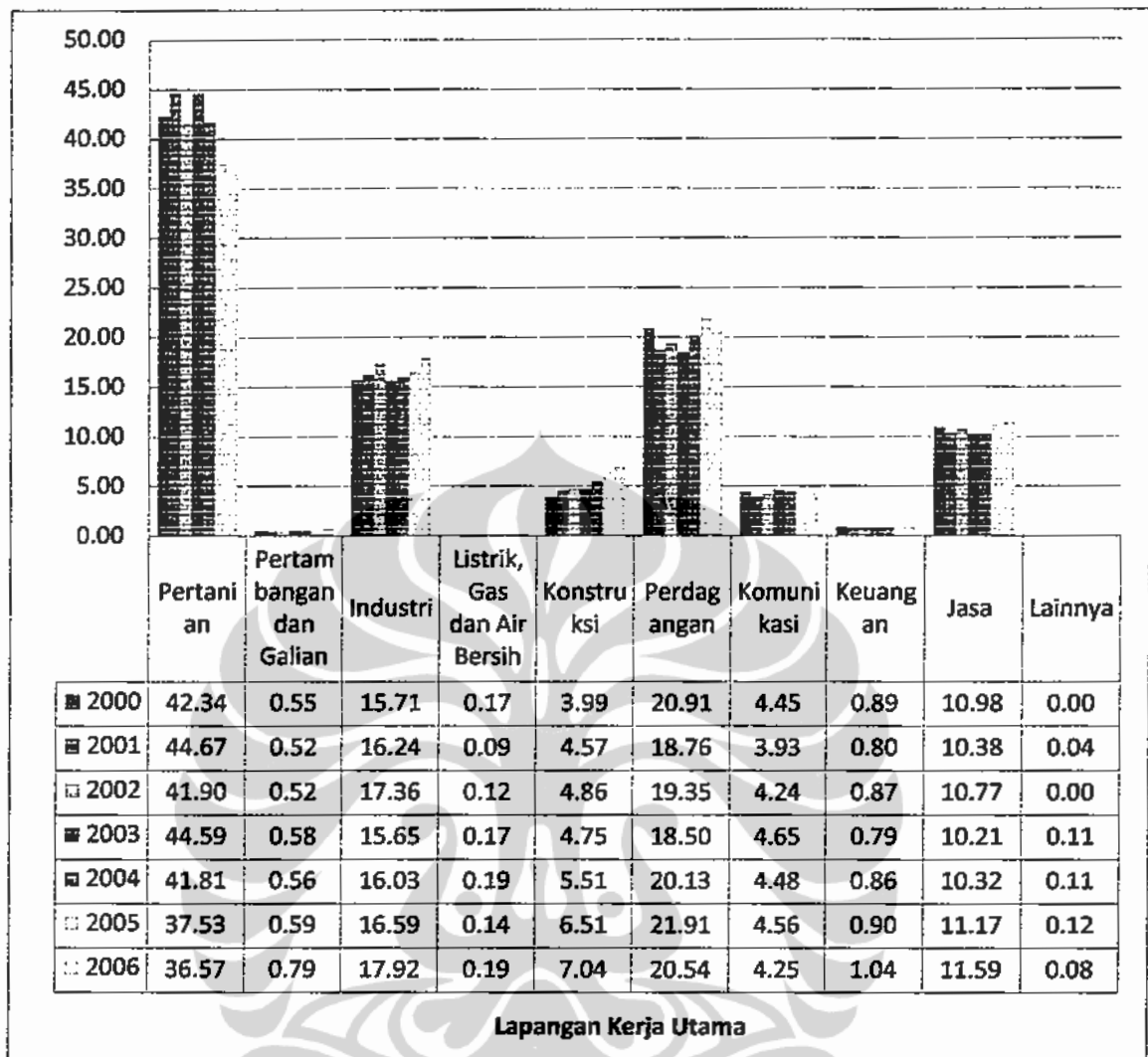
yang mencari pekerjaan. Selama periode penelitian tahun 2000-2006, pertumbuhan pekerja (tenaga kerja) di Jawa Tengah mengalami pasang surut seiring dengan naik turunnya kondisi perekonomian regional di Jawa Tengah. Dimana jumlah pekerja tertinggi selama periode penelitian adalah pada tahun 2005 sebesar 15.655.303 pekerja dan paling rendah pada tahun 2000 sebesar 14.491.222 pekerja. Gambar 2.7. berikut ini menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah selama periode 2000-2006 :



Gambar 2.7 Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2000-2006 (ribuan)

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Sedangkan apabila dilihat dari prosentase tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama di Jawa Tengah periode 2000-2006 dapat diketahui bahwa jumlah terbesar masih didominasi pekerja di sektor pertanian, yang jumlahnya pada tahun 2006 sebesar 36,57 persen yang berarti menurun dari komposisi tahun 2000 yang sebesar 42,34 persen, kemudian disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri. Gambar 2.8 berikut menunjukkan prosentase tenaga kerja menurut lapangan kerja utama di Jawa Tengah Tahun 2000-2006 :



Gambar 2.8 Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Jawa Tengah Tahun 2000-2006

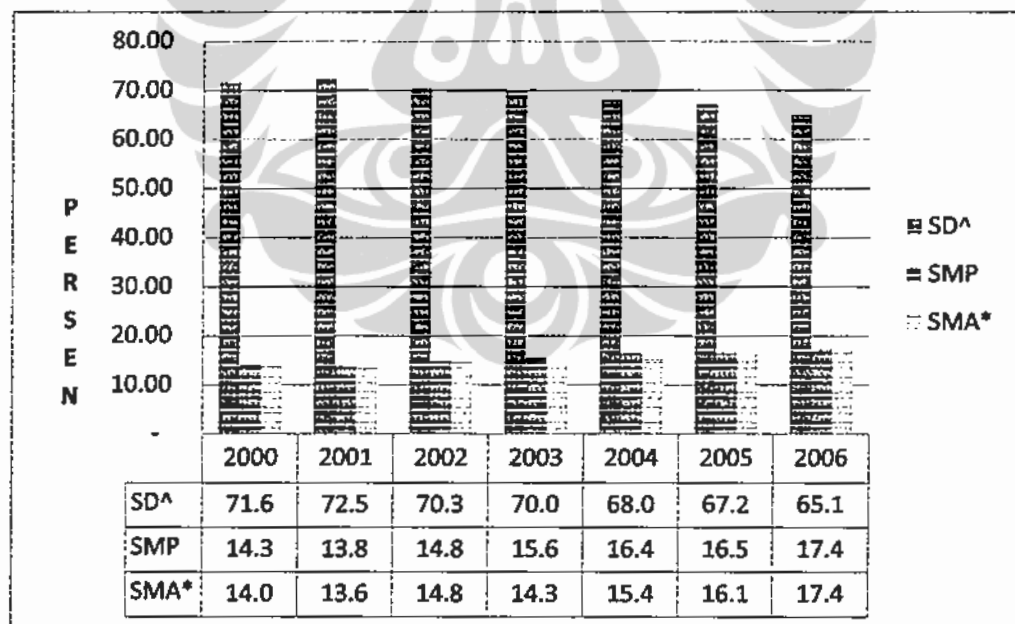
Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Dari gambar 2.8 di atas, terlihat bahwa sebagian penduduk di Jawa Tengah masih menggantungkan hidupnya dari sektor agraris dan baru kemudian di sektor-sektor yang lain. Hal ini antara lain mungkin disebabkan karena pekerjaan di sektor pertanian tidak membutuhkan pendidikan dan ketrampilan khusus, berbeda dengan sektor-sektor yang lain.

2.2.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dari suatu negara/daerah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu ukuran dari kualitas sumber daya manusia dari suatu daerah diantaranya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduknya. Secara umum tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan wawasan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Diharapkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk maka akan menambah jumlah tenaga produktif yang akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berusia 10 tahun ke atas, selama periode penelitian tahun 2000-2006 Propinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh pendidikan tingkat dasar (Sekolah Dasar). Hal ini terlihat dari gambar 2.9 berikut ini :



Gambar 2.9 Persentase Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Jawa Tengah Tahun 2000-2006

Catatan : SD^ : termasuk tidak/belum pernah sekolah dan tidak/tamat SD.

SMA* : termasuk SMA, D1/D2/D3, S1/S2/S3

Sumber : Badan Pusat Statistik (telah diolah kembali)

Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, kualitas penduduk Jawa Tengah dilihat dari tingkat pendidikan terakhirnya masih sangat rendah. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara penduduk yang tamat pendidikan dasar dengan penduduk yang tamat pendidikan SMP dan SMA. Walaupun jumlah tamatan pendidikan dasar (SD) semakin menurun dan sementara di sisi lain jumlah tamatan SMP dan SMA (termasuk D1/2/3, S1/2/3) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode penelitian, namun hal tersebut masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Sehingga diharapkan dengan semakin meningkatnya pendidikan terakhir yang ditamatkan maka kualitas sumber daya manusia yang dimiliki akan meningkat, jenis pekerjaan juga akan semakin membaik, produktifitas penduduk semakin tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.3 Permasalahan Yang Dihadapi dan Kebijakan Pemerintah tentang Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.

Untuk meningkatkan daya saing dan terciptanya struktur perekonomian yang kuat diperlukan investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara makro. Pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang mendasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. (Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jawa Tengah 2001-2005). Dalam periode penelitian tahun 2000-2006, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditargetkan sebesar 4,49 per tahun. Untuk mencapai target sasaran, maka ditempuh kebijakan dibidang ekonomi pada peningkatan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta meningkatkan kemandirian dan daya saing dengan memprioritaskan pada sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil menengah dan/atau usaha kecil menengah dan pariwisata.

Namun demikian untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi Jawa Tengah (Propeda Propinsi Jateng, 2001) antara lain :

1. Keterbatasan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi terlihat dari ketidakseimbangan antara beban tugas-tugas pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Permasalahan yang terjadi pada pembangunan ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah : rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja dan kegiatan pelatihan dan ketrampilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pasar.
3. Sedangkan permasalahan pendidikan yang dihadapi pada saat ini antara lain adalah masih rendahnya tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas. Selama periode penelitian tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah rata-rata sebesar 69 persen untuk pendidikan dasar (SD), 16 persen SMP dan 15 persen SMA (termasuk D1/2/3, S1/2/3):
4. Permasalahan umum yang dihadapi dalam penarikan modal swasta yang dihadapi Jawa Tengah antara lain adalah : sarana prasarana penunjang penanaman modal yang kurang memadai, kurangnya informasi potensi dan peluang penanaman modal yang siap untuk dikembangkan, kurangnya jaminan kepastian hukum yang diakibatkan lemahnya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan rendahnya realisasi penanaman modal dan kesadaran investor terhadap industri yang berwawasan lingkungan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Renstra Jateng, 2003) antara lain :

1. Bidang Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya melalui kebijakan :

- a. Peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan melalui : penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah; pendayagunaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan; intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

Kebijakan yang dilaksanakan dengan jalan mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu menuju terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

3. Bidang Ketenagakerjaan

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan dilakukan antara lain melalui :

- a. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja produktif bagi penganggur dan setengah penganggur baik di perkotaan maupun di perdesaan serta pekerja sektor informal.
- b. Perluasan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur.

4. Bidang Investasi

Kebijakan di bidang penanaman modal di Jawa Tengah diarahkan pada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan infrastruktur yang memadai.

BAB 3

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESA

Bagian pertama bab ini menguraikan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah penulis menggunakan teori tentang pertumbuhan ekonomi dan peranan pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian. Teori pertumbuhan ekonomi yang akan dibahas adalah teori pertumbuhan neo-klasik dan solow, selanjutnya diuraikan tentang peranan pemerintah dalam perekonomian yang dilakukan melalui kebijakan fiskal yang dijelaskan melalui kurva IS-LM dan kurva agregat demand (AD). Pada bagian akhir bab ini akan direview penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya akan disampaikan hipotesa-hipotesa yang akan diuji.

3.1 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik ini secara sederhana menyatakan bahwa faktor produksi yang menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah faktor produksi modal dan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang bukan berasal dari pengaruh kedua faktor utama tersebut disebut sebagai Total Factor Productivity (TFP) atau sering dinyatakan sebagai ukuran kemajuan teknologi yang tidak dapat diketahui apakah berasal dari faktor modal atau tenaga kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa Model Neo-Klasik yang dipelopori oleh Solow (1956) mengidentifikasi tiga sumber pertumbuhan output yaitu stok modal, tenaga kerja dan teknologi.

Model ini mengasumsikan perekonomian berada pada kondisi full employment, pasar bersifat perfect competition, perekonomian hanya menghasilkan satu komoditas homogen, tidak ada biaya transportasi, fungsi produksi regional adalah identik dengan sifat constant return to scale, penawaran kerja tetap dan tidak ada kemajuan teknologi. Dengan asumsi ini, maka upah (marginal product to labor) adalah fungsi dari rasio modal-tenaga kerja (K/L)

sedangkan hasil terhadap modal (marginal product of capital) adalah fungsi kebalikan dari rasio modal tenaga kerja. Dengan fungsi produksi identik di semua daerah maka tenaga kerja akan bergerak dari daerah dengan upah rendah ke daerah dengan upah tinggi dan modal bergerak dengan arah berlawanan. Pergerakan ini akan terus berlangsung sampai faktor return adalah sama di setiap daerah. Dengan asumsi-asumsi bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja yang sama dan didistribusikan di antara daerah proporsional terhadap penduduk, maka proses pertumbuhan regional akan berasosiasi dengan konvergensi dalam pendapatan per kapita regional.

Dengan demikian daerah dengan rasio modal-tenaga kerja tinggi akan memiliki tingkat upah tinggi dan tingkat pengembalian modal rendah. Sehingga daerah yang rasio modal-tenaga kerjanya tinggi akan mengalami arus masuk tenaga kerja dan arus keluar modal dan daerah yang rasio modal-tenaga kerja rendah mengalami hal sebaliknya, artinya daerah dengan tingkat upah yang rendah akan menarik modal dan kehilangan tenaga kerja, sedangkan daerah dengan tingkat upah tinggi akan menarik tenaga kerja dan kehilangan modal.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka agregat fungsi produksi untuk model pertumbuhan neoklasik tanpa perubahan teknologi adalah sebagai berikut :

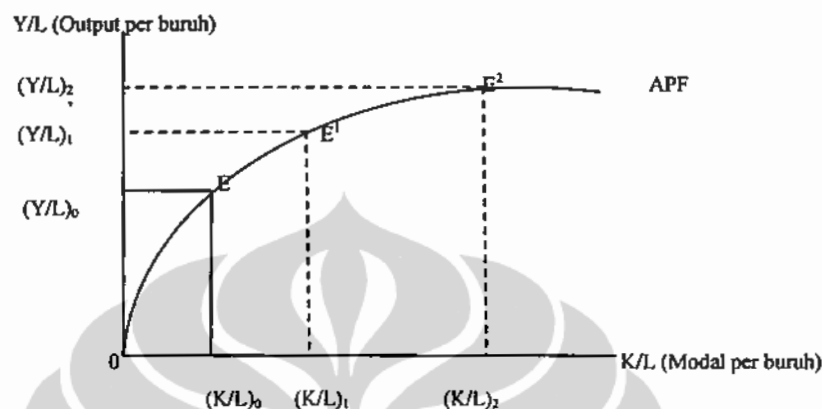
$$Y = F(K, L) \quad (3.1)$$

dimana : Y adalah output, K merupakan kapital dan L adalah tenaga kerja.

Dalam kondisi seperti itu, model pertumbuhan ekonomi neo klasik menekankan pada kebutuhan akan penumpukan modal (*capital deepening*), yang merupakan proses dengan kuantitas modal per buruh yang meningkat sepanjang waktu. Untuk keadaan dengan teknologi tertentu, tingkat investasi yang sangat pesat dalam barang modal cenderung menekan tingkat keuntungan atas modal. Disamping itu, tingkat upah yang dibayarkan kepada buruh cenderung meningkat karena setiap buruh mempunyai lebih banyak modal sehingga produk marjinalnya meningkat. Akibatnya, tingkat upah kompetitif meningkat bersamaan dengan produk marjinal tenaga kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penumpukan modal terjadi apabila persediaan modal tumbuh lebih cepat daripada angkatan kerja. Dalam keadaan tanpa perubahan teknologi, pendalaman modal akan menghasilkan

pertumbuhan output per buruh, produk marjinal tenaga kerja, dan upah riil. Ini juga menyebabkan berkurangnya keuntungan atas modal sehingga mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan atas modal (Samuelson & Nordhaus, 2004). Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar 3.1. berikut :



Gambar 3.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perubahan Teknologi

Ketika terjadi penumpukan modal, buruh bekerja dengan semakin banyak modal, ekonomi bergerak ke atas dan ke kanan pada agregat fungsi produksi. Misalkan bahwa modal-rasio tenaga kerja meningkat, dari $(K/L)_0$ ke $(K/L)_1$, maka jumlah output per buruh meningkat dari $(Y/L)_0$ ke $(Y/L)_1$ dan berhenti di $(Y/L)_2$. Pada keadaan keseimbangan jangka panjang dalam model pertumbuhan neoklasik tanpa perubahan teknologi, akhirnya rasio modal-tenaga kerja akan berhenti meningkat (E bergerak ke E^1 hingga berhenti di E^2). Dalam jangka panjang, ekonomi akan memasuki keadaan tetap dengan penumpukan modal berhenti, upah riil berhenti bertumbuh, serta laba modal dan suku bunga riil tetap.

3.2 Teori Pertumbuhan Solow

Model ini pada dasarnya hampir sama dengan model neo klasik, dengan perbedaan pada penambahan variable produktivitas akibat kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa model terdiri atas variabel output dan input yaitu variable output (Y) dan variabel input terdiri dari modal (K), labor atau tenaga kerja (L) dan pengetahuan (A). Pada suatu waktu, perekonomian memiliki sejumlah kapital, tenaga kerja, pengetahuan, yang

semuanya membentuk kombinasi untuk menghasilkan output. Fungsi produksi yang digunakan, dengan t = waktu adalah sebagai berikut :

$$Y(t) = A(t) F(K(t), L(t)) \quad (3.2)$$

Dalam fungsi ini variabel waktu mempunyai peranan bahwa output akan berubah dari waktu ke waktu jika input-input produksi tersebut berubah. Secara khusus bahwa sejumlah output diperoleh dari akumulasi sejumlah kapital dan tenaga kerja yang bertambah dari waktu ke waktu dan adanya kemajuan teknologi jika terjadi akumulasi pengetahuan. Variabel pengetahuan (A) kemajuan teknologinya bersifat *Hicks Neutral* yang artinya penggunaan teknologi akan membuat outputnya semakin meningkat tanpa diketahui melekat pada input kapital (K) atau tenaga kerja (L). Dalam model ini diasumsikan bahwa pertumbuhan input tenaga kerja dan pengetahuan konstan, sedangkan pertumbuhan kapital tergantung pada tabungan yang disisihkan dari pendapatan dikurangi depresiasi kapital. Model ini juga mengasumsikan fungsi produksi adalah *constant return to scale (CRS)*, sehingga antara input dan output bersifat proporsional misalnya kapital dan tenaga kerja digandakan dua kali lipat maka jumlah produksi yang dihasilkan juga dua kali lipat, perekonomian sudah terspesialisasi dan input lainnya dianggap tidak penting (misalnya tanah, sumber daya alam, lokasi).

Variabel pengetahuan (A) apabila dilekatkan pada tenaga kerja (L) maka teknologinya bersifat *labor augmenting/harrod neutral* yaitu teknologinya dapat membuat tenaga kerjanya semakin efektif. Sehingga modelnya menjadi :

$$Y(t) = F(K(t), A(t) L(t)) \quad (3.3)$$

Dalam perkembangannya, para ahli ekonomi menekankan pentingnya modal manusia dalam proses pertumbuhan. Perbaikan kualitas tenaga kerja dapat memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena kualitas yang meningkat akan berdampak pada peningkatan produktivitas dalam berproduksi. Selanjutnya untuk menjelaskan bahwa modal manusia sama pentingnya dengan modal fisik, Mankiew, Rommer dan Weil (1990) menambahkan akumulasi modal manusia pada model pertumbuhan Solow dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, sehingga model ini menjadi :

$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta (A(t)L(t))^{1-\alpha-\beta} \quad (3.4)$$

Dimana pada model tersebut H adalah stock modal manusia yaitu total produktivitas yang disumbangkan oleh pekerja atau jumlah kontribusi pekerja dengan tingkat keterampilan yang berbeda-beda terhadap produksi. Kontribusi tersebut meliputi *raw labor* (keterampilan atau modal dasar yang dimiliki tenaga kerja) maupun *human capital* atau modal manusia yaitu keterampilan yang dicapai melalui serangkaian usaha (*acquired skills*). Sama halnya dengan modal fisik maka modal manusia juga dilihat sebagai variabel yang bersifat eksogen. Model ini mengasumsikan bahwa modal manusia setiap tenaga kerja tergantung pada tahun-tahun pendidikan yang diikutinya atau sama dengan asumsi bahwa input modal manusia pada fungsi produksi adalah lama sekolah (Romer, 2006).

Berkenaan dengan modal manusia (*human capital*), Ananta (1990) menyebutkan bahwa perubahan mutu modal manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sejalan dengan itu Gunerson (1993) menyebutkan bahwa modal manusia bisa dikembangkan melalui berbagai bentuk diantaranya pendidikan formal, pendidikan non-formal, pengalaman kerja, kesehatan dan gizi, migrasi dan sebagainya. Sedangkan mengenai pendidikan, Sukirno (2004) menyebutkan bahwa sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, ketrampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi dan hal ini akan menyebabkan produktifitas bertambah. Supriadi (1992) menyatakan bahwa pendidikan dapat merubah sikap menjadi mudah menerima, berorientasi ke masa depan dan selalu berusaha mencapai sasaran yang lebih baik. Di samping itu juga pendidikan dapat meningkatkan keahlian dan ketrampilan baru, baik di bidang-bidang profesional maupun keahlian berorganisasi. Secara individu pendidikan mempunyai dua pengaruh utama, yaitu :

- (1) Memberikan pengetahuan tertentu dan keahlian berpikir yang umum.
- (2) Mendorong perubahan-perubahan nilai, keyakinan dan sikap seseorang terhadap pekerjaan dan tanggung jawab sosial.

Kedua pengaruh itu adalah penting dalam membentuk produktivitas individu maupun kelompok, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

3.3 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Bertitik tolak dari pendapat aliran klasik, negara-negara penganut ekonomi liberal berpendirian bahwa sebaiknya peranan pemerintah dalam perekonomian adalah sekecil mungkin, karena kehadiran pemerintah dalam mekanisme harga akan menyebabkan in-efisiensi (Nurdjaman, 1992) Menurut pendapat tersebut sebuah perekonomian yang ideal, dimana pengaturan alokasi sumber daya yang terjadi karena adanya pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Namun dalam prakteknya dalam perekonomian seringkali terjadi ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan karena adanya *assymetric information*, monopoli maupun distribusi pendapatan yang tidak merata.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengambil peranan dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan pendapat aliran Keynes bahwa diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sehingga saat ini terjadi gejala umum di mana dari waktu ke waktu volume kegiatan pemerintah terus meningkat.

Menurut Samuelson (Nurjaman, 1992), ada 3 instrumen pokok yang dimiliki pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga instrumen tersebut adalah (i) pajak-pajak yang bisa mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat dan oleh karena itu ada sejumlah sumber dana yang sekarang bebas dipergunakan untuk pengeluaran negara, pajak-pajak juga dapat menggalakkan atau menghalangi (*discourage*) sejumlah macam kegiatan ekonomi tertentu; (ii) pengeluaran pemerintah yang bisa mendorong perusahaan dan para pekerja memproduksi barang-barang dan jasa tertentu, dan juga salah satu jenis pengeluaran yang disebut *transfer payments* (pengeluaran untuk *welfare*) bisa mendukung pendapatan dan (iii) peraturan-peraturan atau pengawasan pemerintah yang langsung mengarahkan masyarakat untuk berbuat sesuatu (*perform*) atau tidak berbuat sesuatu (*desist*). Dengan demikian kegiatan pemerintah yang tidak efisien dan salah arah dalam kenyataannya akan membawa akibat yang fatal dalam kehidupan masyarakat.

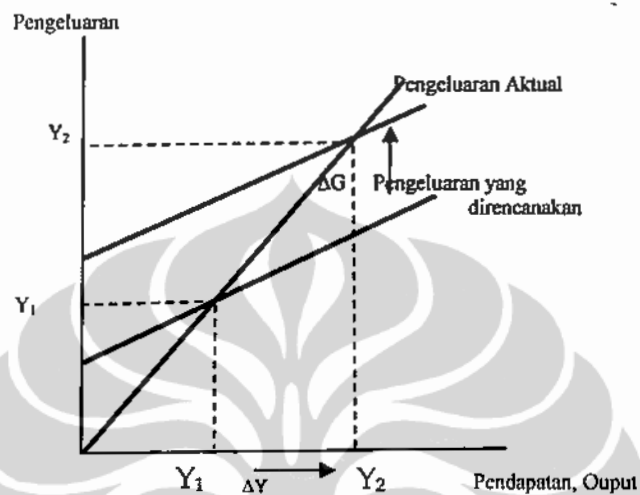
Untuk menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian tersebut, kita dapat menggunakan analisa tentang model permintaan agregat (AD) dengan kurva IS-LM yang merupakan interpretasi dari teori Keynes. Permintaan agregat (Aggregate demand, AD) merupakan model yang menggambarkan hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga agregate atau menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan dan pemerintah pada setiap tingkat harga (Mankiw, 2007).

Model IS-LM ini dapat menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap dan juga menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa ketika tingkat harga tetap, pergeseran permintaan agregat akan menyebabkan perubahan pendapatan nasional. Bentuk permintaan agregat sebagaimana kurva permintaan adalah miring ke bawah, sedangkan salah satu yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri ataupun ke kanan adalah perubahan dalam pengeluaran/belanja pemerintah. Ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan pengeluaran pemerintah, maka terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang akan menyebabkan pergeseran kurva IS ke kanan dan sebaliknya apabila diambil kebijakan untuk menurunkan pengeluaran pemerintah, maka akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang akan menyebabkan pergeseran kurva IS ke kiri. Karena kurva permintaan agregate merupakan ringkasan hasil dari model IS-LM maka pergeseran pada kurva IS dari IS_1 ke IS_2 ini akan menggeser kurva permintaan agregate (AD) dari AD_1 ke AD_2 .

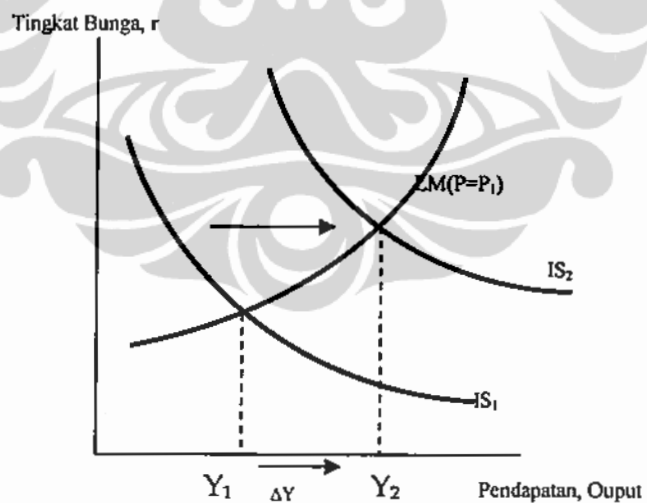
Dengan asumsi perekonomian dalam jangka pendek, maka kurva penawaran aggregate (AS) berbentuk miring ke atas (upward slopping). Kenaikan permintaan aggregate yang disebabkan oleh kenaikan pengeluaran pemerintah ini, dengan kurva penawaran aggregate (AS) yang tetap, akan menyebabkan output dan harga akan meningkat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perpotongan keynesian, kurva IS-LM, kurva permintaan agregate (AD) dan keseimbangan kurva AD dan kurva AS pada gambar 3.2 di bawah ini :

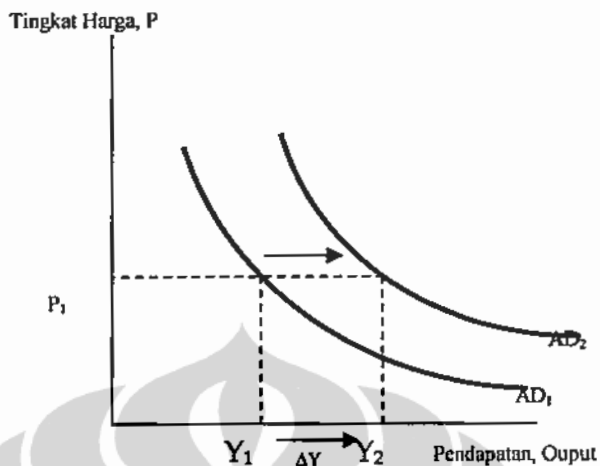
a). Perpotongan Keynesian



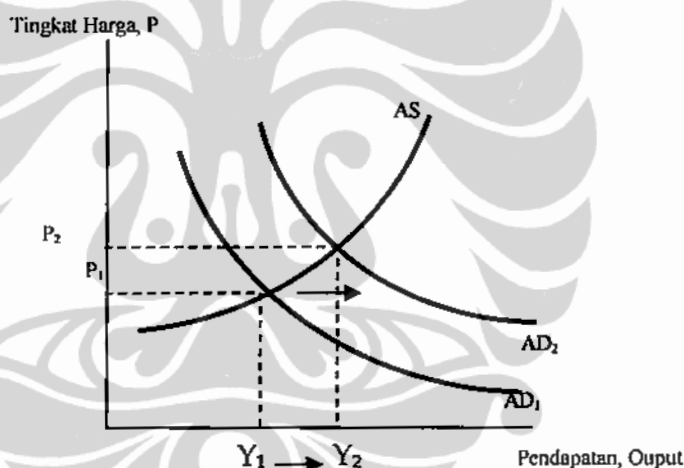
b). Kurva IS



c). Kurva Permintaan Agregate



d). Kurva Keseimbangan AD-AS



Gambar 3.2. Model Perpotongan Keynesian, IS-LM, Kurva Permintaan Agregate dan Keseimbangan AD-AS

Kurva tersebut menjelaskan bahwa kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar ΔG meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah yang sama untuk semua tingkat pendapatan. Sedangkan pendapatan, output akan naik sebesar ΔY yang berarti melebihi kenaikan belanja pemerintah yang sebesar ΔG . Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah mempunyai dampak pengganda (multiplied effect) terhadap pendapatan sebesar $\Delta G/(1-MPC)$ sehingga kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah tersebut. Karena kurva permintaan aggregate (AD) merupakan ringkasan hasil dari model IS-LM, peristiwa yang

Universitas Indonesia

menggeser kurva IS untuk setiap tingkat harga akan meningkatkan output. Sehingga ekspansi fiskal berupa kenaikan belanja pemerintah tersebut akan menyebabkan kurva permintaan aggregate bergeser ke kanan. Dengan asumsi kurva penawaran aggregate miring ke atas, maka harga dan output meningkat naik.

Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran pemerintah akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat melalui berbagai sektor antara lain produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan keseimbangan perekonomian (Brata dan Trihartanto, 2004).

Melalui sektor produksi pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor modal, tenaga kerja dan manajemen tersebut. Misalnya saja pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. Sumber daya manusia itu memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh sektor produksi.

Distribusi barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Sebagai contohnya adalah bahwa hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan, paling tidak akan menambah ketrampilan sejumlah orang sehingga akan menjadi tenaga kerja yang berpenghasilan relatif baik dan berdaya beli baik sehingga akan membuat distribusi barang menjadi merata. Demikian pula pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang dikeluarkan untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang mempunyai daya beli rendah akan menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.

Secara langsung maupun tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun melalui mekanisme pasar. Misalnya penambahan penyediaan barang yang bersifat kolektif (publik) maupun barang-barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah.

Terakhir adalah keseimbangan perekonomian sebagai sektor yang terpengaruh oleh adanya pengeluaran pemerintah sebagai salah satu kebijakan

fiskal yang diambil oleh pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional dan daerah melalui target peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kebijakan fiskal tersebut dapat berupa pelaksanaan kebijakan surplus anggaran, defisit anggaran dan investasi umum yang pelaksanaannya tergantung pada situasi ekonomi yang dihadapi atau iklim ekonomi yang diinginkan.

3.4 Penelitian Empiris tentang Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Hipotesa Penelitian

Penelitian tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan memberikan hasil yang berbeda satu sama lain tentang bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan akan diuraikan dibawah ini berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, variabel yang digunakan, metode estimasi dan hasil penelitian yang diperoleh.

Penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah berdasarkan sektor dan fungsinya dilakukan oleh Landau (1986); Devarajan (1993); Kweka dan Morrissey(2000); serta Baffes dan Syah (1998). Landau (1986) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah dengan fokus penelitian pada negara berkembang dan Devarajan (1993) meneliti pada 14 negara OECD. Lin (1994), menggunakan sampel 62 negara, sub sampel 20 negara maju (ADC) dan sub sampel 42 negara berkembang (LDC). Sedangkan Baffes dan Syah (1998) meneliti pengaruh produktivitas pengeluaran pemerintah di 21 negara serta Kweka dan Morrissey (2000) memfokuskan penelitian di Tanzania. Di Indonesia penelitian tentang pengeluaran pemerintah antara lain dilakukan oleh Setiati (1996) yang menganalisa peran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang lain dilakukan oleh Effendi (2006) yang menganalisa dari sisi perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan PDB Indonesia dan Hariyati (2007) menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah pada tingkat propinsi.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, para peneliti pada umumnya menggunakan variabel dependen pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDB atau GDP negara atau PDRB daerah yang diteliti. Landau (1986) menggunakan GDP perkapita, sedangkan Lin (1994) menggunakan variabel tingkat pertumbuhan (growth rates) sebagai variabel dependennya.

Apabila dilihat dari variabel independent yang digunakan, maka Landau (1986) menganalisa pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi konsumsi, militer dan pendidikan serta belanja transfer. Sedangkan Devarajan (1993) menganalisa pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi (produktif) dan belanja rutin. Ram (1986) selain menggunakan pengeluaran konsumsi pemerintah sebagai variabel bebasnya, juga menambahkan investasi swasta dan pertumbuhan angkatan kerja. Kweka dan Morrissey (2000) menambahkan pengeluaran pemerintah untuk investasi dan modal SDM selain pengeluaran konsumsi dan investasi swasta. Lin (1994) memasukkan total investasi, total pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja sebagai variabel bebasnya. Setiati (1996) selain melihat dari pengeluaran pemerintah melalui konsumsi pemerintah juga menambahkan variabel bebas investasi, mutu modal manusia dan perubahan demografi. Baffes dan Syah (1998) menggunakan variabel bebas tenaga kerja, pengeluaran untuk pengembangan sektor swasta, infrastruktur, sumber daya manusia dan pertahanan keamanan. pengeluaran pemerintah bagi perekonomian. Effendi (2006) menggunakan belanja pegawai, barang, subsidi, rutin lainnya, pembangunan, investasi swasta dan jumlah pekerja sebagai variabel bebasnya. Sedangkan Hariyati (2007) menggunakan variabel bebas investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, pada umumnya para peneliti menggunakan analisa data panel sebagai model estimasi. Kweka dan Morrissey (2000) dan Effendi (2006) menggunakan analisa data time series untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Landau (1986) menemukan bahwa konsumsi pemerintah setelah dikurangi untuk militer dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pendidikan berkorelasi sangat

Universitas Indonesia

kuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer dan transfer tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian Gupta (1988) dalam studinya menemukan hubungan antara pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan tersebut bersifat positif untuk negara yang sedang berkembang dan negatif untuk negara maju. Kesimpulan yang sama juga didapatkan dari penelitian Lin (1994) yang menemukan hasil bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh positif, dengan laju yang semakin kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang hampir sama juga didapatkan dari penelitian Devarajan, Swaroop dan Zou (1993) yang melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara komposisi pengeluaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi hanyalah pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin (tidak produktif) sedangkan pengeluaran pemerintah yang lainnya mempunyai hubungan yang negatif. Di Indonesia, Setiati (1996) menyimpulkan bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah yang merupakan proksi besarnya peranan sektor pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun kecil jika dilihat dari segi besarnya.

Sementara, penelitian Barro (1990) menyimpulkan bahwa peningkatan dalam penyaluran sumber daya untuk pelayanan pemerintah yang bersifat non produktif (meskipun bernilai guna tinggi) akan berhubungan dengan pertumbuhan kapita yang lebih rendah. Ukuran pemerintah (yang dihitung dari bagian pengeluaran pemerintah dalam PDB) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bila ukuran pemerintah kecil, peningkatan dalam ukuran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan output dan sebaliknya, jika ukuran pemerintah besar, peningkatan dari ukuran pemerintah tersebut akan menurunkan tingkat pertumbuhan. Hasil penelitian empiris Baffes dan Syah (1998) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja. Elastisitas tertinggi dihasilkan pada pengeluaran untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengeluaran untuk pengembangan sektor swasta. Kweka dan Morissey (2000) menemukan bahwa kenaikan pengeluaran produktif (investasi fisik) mempunyai pengaruh yang negatif

Universitas Indonesia

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang negatif ini diperkirakan karena adanya ketidakefisienan investasi publik yang terjadi di Tanzania pada periode penelitian. Namun di sisi lain, diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada waktu tertentu juga berpengaruh terhadap konsumsi swasta. Ditemukan juga bahwa tidak ada pengaruh pengeluaran publik di bidang modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang mereka lakukan juga menemukan hasil bahwa investasi swasta mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Effendi (2006) menyimpulkan bahwa perubahan belanja pegawai, belanja rutin lain, belanja pembangunan dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PDB Indonesia dalam periode penelitian. Sementara perubahan belanja barang dan jumlah bekerja tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB Indonesia. Sedangkan perubahan pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDB Indonesia dalam periode penelitian. Hasil penelitian Hariyati (2007) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia selama periode penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel terikat, ditentukan oleh variabel-variabel bebas sebagai penjelas berupa pengeluaran pemerintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan acuan tersebut, melalui penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah, kapital yang didekati melalui kredit investasi, kredit modal kerja dan ketersediaan infrastruktur (listrik dan air), serta variabel tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia yang dalam penelitian ini dilihat dari jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA ke atas terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature tentang pengembangan ekonomi regional khususnya di bidang kebijakan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota. Saat ini penelitian sejenis masih memusatkan perhatian

Universitas Indonesia

pada lingkup yang lebih luas yaitu pada pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga penelitian tentang perekonomian regional apalagi di tingkat Propinsi dengan basis data kabupaten/kota belum banyak dilakukan. Padahal di sisi lain, di era otonomi daerah kabupaten/kota mendapat kewenangan yang luas untuk mengatur urusannya sendiri termasuk di antaranya adalah mengenai pengeluaran pemerintah dan perekonomiannya. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk digunakan oleh para pembuat kebijakan di kabupaten/kota dalam menyusun rencana dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan akhir pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat benar-benar dilakukan melalui pengeluaran pemerintah yang efisien dan efektif.

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil penelitian empiris sebelumnya, maka penelitian ini melakukan pendugaan sementara pengaruh dari masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Kredit investasi dan modal kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Ketersediaan infrastruktur (jaringan listrik dan air) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

BAB 4 METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan yang meliputi tentang data dan sumber data yang digunakan, spesifikasi model dan variable penelitian serta definisi operasional variable. Selanjutnya juga akan diuraikan tentang proses estimasi yang dilakukan dengan data panel yang meliputi tentang model estimasi data panel, pemilihan model estimasi dalam data panel dan uji signifikansi terhadap variable penelitian.

4.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yang merupakan gabungan dari data cross-section 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan data time-series selama periode 2001-2006. Menurut sumbernya, data tersebut berasal dari :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) yakni meliputi : harga produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000, total pengeluaran pemerintah yang mencakup pengeluaran rutin/aparatur dan pengeluaran pembangunan/publik, data ketersediaan infrastruktur yang terdiri dari jaringan listrik (PLN) dan air bersih (PDAM), data tenaga kerja, serta persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA.
- b. Bank Indonesia terdiri dari data realisasi kredit investasi dan kredit modal kerja yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia tentang Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA).

Data total pengeluaran pemerintah, realisasi kredit investasi dan kredit modal kerja yang diperoleh masih dalam nilai nominalnya. Agar data-data tersebut konsisten dengan variable tidak bebasnya (data harga PDRB atas harga konstan) maka data seharusnya dalam bentuk nilai riilnya. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan penyesuaian dengan cara data dalam bentuk nilai nominal tersebut dikalikan dengan angka indeks yang diperoleh dari PDRB harga konstan dibagi dengan PDRB harga berlaku. Sehingga data yang diolah lebih lanjut sudah dalam bentuk data riilnya.

4.2 Spesifikasi Model dan Variabel yang Digunakan

Dalam penelitian ini analisis regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, kredit investasi dan modal kerja, ketersediaan infrastruktur (jaringan listrik dan air bersih), tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.

Model ekonomi yang digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan beberapa variable lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah model solow yang dikembangkan oleh Ram (1986), dan dikembangkan kembali dalam model Mankiw-Romer-Weil (1990), Kweka dan Morrissey (2000) Effendi (2006) dan Wuri (2007), maka dalam penelitian ini diperoleh model estimasi :

$$Y = f(PP, K, L, H) \quad (4.1)$$

Dimana dari model tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah (Y) merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah (PP), kapital (K), tenaga kerja (L) dan sumber daya manusia (H).

Dengan melihat ketersediaan data dan variabel-variabel bebas dalam penelitian sebelumnya, maka pengeluaran pemerintah (PP) didekati dengan data total realisasi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Total PP) yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran rutin/aparatur dan pengeluaran pembangunan/publik. Kapital didekati dengan data penyaluran realisasi kredit investasi (KInv), kredit modal kerja (KMK) dari bank umum dan ketersediaan infrastruktur (listrik dan air). Penggunaan data ketersediaan infrastruktur fisik diadopsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD (2004) yang salah satunya menggunakan ketersediaan jaringan listrik, jalan dan telpon sebagai faktor daya tarik investasi daerah. Tenaga kerja (L) didekati dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan kerja utama seminggu yang lalu dan kualitas sumber daya manusia (H) didekati dengan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA.

Dalam penelitian ini, untuk menghindari adanya persamaan identitas karena pengaruh langsung dari pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap nilai PDRB atas harga riil diduga bahwa total pengeluaran pemerintah, kredit

investasi dan kredit modal kerja yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah merupakan pengeluaran dan realisasi tahun sebelumnya (t-1).

Selanjutnya berdasarkan model estimasi tersebut, dapat direpresentasikan dalam model regresi ekonometri, yaitu :

$$\ln Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln \text{TotalPP}_{i(t-1)} + \beta_2 \ln \text{KInv}_{i(t-1)} + \beta_3 \ln \text{KMK}_{i(t-1)} + \beta_4 \ln \text{Listrik}_{it} + \beta_5 \ln \text{Air}_{it} + \beta_6 \ln \text{Tk}_{it} + \beta_7 \text{Pddikn}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

dimana :

Y	= PDRB ADHK 2000
TotalPP	= total pengeluaran pemerintah riil
KInv	= realisasi penyaluran kredit investasi riil
KMK	= realisasi penyaluran kredit modal kerja riil
Listrik	= energi listrik terjual (PLN)
Air	= air bersih tersalurkan (PDAM)
TK	= jumlah tenaga kerja
Pddikn	= persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA
ε	= error term
β_1, \dots, β_7	= koefisien regresi dari masing-masing variable independen
i	= individu (kabupaten/kota)
t	= periode/waktu
(t-1)	= periode tahun sebelumnya

4.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable yang digunakan untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah :

a. Pertumbuhan ekonomi

Adalah nilai PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan harga konstan tahun 2000 dengan satuan rupiah.

b. Total pengeluaran pemerintah

Adalah besarnya realisasi total pengeluaran pemerintah yang digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang didanai dan tercantum dalam APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2000-2005 dalam satuan nilai rupiah.

c. Kredit investasi

Adalah besarnya realisasi kredit jangka menengah/panjang yang disalurkan bank umum menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru tahun 2000-2005 dalam satuan nilai rupiah.

d. Kredit Modal Kerja

Adalah besarnya realisasi kredit jangka pendek yang disalurkan bank umum menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk membiayai keperluan modal kerja tahun 2000-2005 dalam satuan nilai rupiah.

e. Jaringan listrik

Adalah jumlah energi listrik terjual (PLN) menurut kabupaten kota di Jawa Tengah tahun 2001-2006 dengan satuan Kwh.

f. Jaringan air bersih

Adalah banyaknya air bersih tersalurkan (PDAM) menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2001-2006 dengan satuan m³.

g. Tenaga kerja

Adalah jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama (pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air minum, konstruksi, perdagangan, transportasi, bank dan jasa) selama seminggu yang lalu di kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2001-2006 dengan satuan jiwa.

h. Pendidikan

Adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menamatkan pendidikan SMA ke atas selama tahun 2001-2006 dengan satuan persen.

Secara rinci variabel dan sumber data serta pengaruh yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Variabel dan Sumber Data serta Pengaruh Yang Diharapkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No.	Variabel	Satuan Data	Sumber data	Pengaruh Diharapkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Yang terhadap
1.	PDRB atas dasar Harga konstan tahun 2000	Rupiah	BPS		
2.	Total pengeluaran pemerintah	Rupiah	BPS	+/-	
3.	Kredit Investasi	Rupiah	BI	+	
4.	Kredit Modal Kerja	Rupiah	BI	+	
5.	Jaringan Listrik dan Air	Kwh dan M ³	BPS	+	
6.	Jumlah tenaga kerja usia 10 tahun ke atas	Jiwa	BPS	+	
7.	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA	Persen	BPS	+	

4.4 Analisa dengan Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh beberapa variable independen yaitu total pengeluaran pemerintah, realisasi kredit investasi, realisasi kredit modal kerja, ketersediaan infrastruktur (listrik dan air), tenaga kerja dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah, penulis menggunakan analisis regresi data panel. Penggunaan model regresi data panel memungkinkan peneliti untuk dapat menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda-beda. Selain itu penggunaan data panel dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah observasi penelitian, karena apabila hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* saja, observasi penelitian relatif sedikit.

Menurut Hsiao dalam Greene (2005) keuntungan panel keuntungan, antara lain:

1. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap, karena merupakan gabungan antara data *cross section* dan

data *time series*. Dengan demikian, model regresi data panel akan menghasilkan *degree of freedom (df)* yang lebih besar yang selanjutnya akan meningkatkan presisi dari estimasi regresi.

2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan data *cross section*, dapat mengatasi masalah yang timbul akibat penghilangan variabel (*omitted variable*),

Sedangkan menurut Badi H. Baltagi dalam Manurung (2005), beberapa keuntungan penggunaan data panel adalah sebagai berikut :

1. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data lebih banyak,
2. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model (*unobserved heterogeneity*),
3. Data panel mampu mengindikasikan dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diperoleh dengan data *cross section* atau *time series* murni.
4. Data panel mampu mengurangi kolinieritas antar variabel, dan
5. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan studi berulang data *cross section*.

Greene (2005) menambahkan bahwa kelebihan analisis regresi panel yang fundamental adalah adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi peneliti dalam memodelkan perbedaan perilaku di antara individu-individu. Namun demikian data panel sebagai salah satu alat analisis dalam ekonometrika juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain (Baltagi, 1995) :

- 1) Masalah koleksi data dan desain.
- 2) Kemungkinan distorsi dari kesalahan pengukuran.
- 3) Dimensi seri waktu yang lebih pendek.

Data yang dipergunakan dalam analisis ekonometrika dapat berupa data *time series*, data *cross section*, atau data panel. Data panel (*panel pooled data*) merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, data panel dicirikan oleh

T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) yang kecil dan n jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, n$) yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yakni data panel terdiri dari periode waktu yang besar dan jumlah individu yang kecil. Regresi dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Di dalam model regresi klasik, gangguan (error terms/disturbance) selalu diasumsikan bersifat homoskedastik dan serial uncorrelated. Implikasinya, penggunaan metode OLS akan menghasilkan penduga yang bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Asumsi tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan kepada metode data panel yang disusun atas beberapa individu untuk beberapa periode (Ekananda, 2005). Hal ini dikarenakan bertambahnya gangguan yang kini menjadi 3 macam yaitu: gangguan antar waktu (time series related disturbances), antar individu (cross section disturbance), dan gangguan antar waktu dan antar individu (Pyndick dan Rubinfeld, 1991).

Dalam model regresi data panel adanya gejala heterokedastik diperbaiki dengan melakukan *cross section weight* sehingga diharapkan tidak ada korelasi antara error dengan variable bebas dalam model dan perilaku error term tidak memiliki pola yang sistematis. Sedangkan dalam mengatasi korelasi serial (autocorrelation) metode fixed effect diasumsikan dapat mengatasi masalah korelasi serial. Dengan demikian diharapkan bahwa nilai yang dihasilkan dapat menunjukkan nilai yang baik, efisien dan tidak bias serta dapat menggambarkan pengaruh yang murni dari variable bebas terhadap variable tidak bebas sehingga layak dijadikan sebagai dasar analisa.

Melalui analisis data panel, kita dapat menangkap perilaku individu yang berbeda selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh parameter estimasi. Spesifikasi model regresi data panel yang memuat efek yang spesifik individu adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_{it} x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.3)$$

dimana, y_{it} dan x_{it} masing-masing merupakan nilai variabel tak bebas dan variabel-variabel bebas untuk setiap individu i pada periode t dimana $i = 1, \dots, n$ dan $t = 1, \dots, T$. Pada x_{it} ada sebanyak $k-1$ slope (tidak termasuk *intercept*) yang menunjukkan jumlah variabel bebas yang digunakan dalam model.

Sedangkan α_i merupakan efek individu yang dapat bernilai konstan sepanjang periode t atau bahkan berbeda-beda untuk setiap individu ke- i .

Data panel yang dikatakan seimbang (*balanced*) maka jumlah observasi menjadi $n \times T$. Namun apabila data panel tidak seimbang (*unbalanced*), maka jumlah observasi menjadi $\sum_{i=1}^n T_i$. Pada saat $n = 1$ dan T cukup besar, maka data bersifat *time series*. Sebaliknya, pada saat $T = 1$ dan n cukup besar maka data bersifat *cross section*. Data panel mengacu pada kasus dimana $T > 1$ dan $n > 1$. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada data panel yang bersifat *balanced panel*, yaitu dimana kita memiliki jumlah observasi yang sama untuk setiap unit individunya. Dengan demikian, total observasi yang dimiliki adalah sejumlah $n \times T$.

4.5 Estimasi Regresi Data Panel

Ditinjau dari berbagai asumsi dan faktor-faktor pembentuknya, struktur model estimasi data panel dapat dikelompokkan menjadi model *common effects*, *fixed effect* dan *random effect*.

4.5.1. Model Common Effects.

Model estimasi common effects adalah metode estimasi data panel yang tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Sehingga intersep α dan slope β adalah sama untuk setiap individu ($\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_i$ dan $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i$). Model common effect dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i \quad (4.4)$$

Sehingga pada model common effects tidak akan dapat melihat perubahan antara individu karena perilaku antar individu dalam berbagai periode waktu dianggap sama.

4.5.2. Model Individual Effects

Model ini mengestimasi parameter (α dan β) dengan memperhatikan sifat dari individu tanpa memperhatikan struktur covarian error term ($\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_i$ dan $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i$). Bentuk umum dari model ini adalah :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_{it} X_{it} + \epsilon_{it} \quad (4.5)$$

dimana i adalah jumlah unit cross section dan t adalah jumlah series waktu. Model ini dikenal juga dengan panel (Gujarati, 2003), yang terdiri dari model fixed effects dan random effect dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Model Fixed Effects

Pendekatan dengan metode ini mengasumsikan bahwa perbedaan dalam antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Model ini menggunakan variable dummy, sehingga intersep bervariasi terhadap individu, namun slope coefficient tetap antar individu dan antar waktu. Oleh karena itu maka setiap α_i adalah parameter yang belum diketahui yang akan diestimasi untuk setiap unit. Dan model umum untuk fixed effect adalah :

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \varepsilon_{it} \quad (4.6)$$

dimana nilai α berbeda untuk setiap individu, sedangkan β sama untuk semua individu.

2. Model Random Effects

Metode random menentukan nilai α dan β didasarkan pada asumsi bahwa intercept α tersebar acak dalam unit μ_i dan konstan sepanjang waktu. Pada model ini, perbedaan antarindividu dan antara waktu diakomodasi melalui error-nya. Sehingga metode random memperhitungkan disturbance yang berasal dari individu dan waktu guna memperoleh efisiensi pendugaan kuadrat terkecil. Metode random ditulis dalam persamaan umum sebagai :

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad (4.7)$$

Dimana μ_i adalah residual secara individu dan ε_{it} adalah residual secara menyeluruh.

4.6 Uji Spesifikasi Model

Dari ketiga model yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu model *common effects*, model *fixed effects*, dan model *random effects*, maka selanjutnya akan ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Apabila dilihat dari data yang digunakan dalam penelitian, terdapat dua pendapat mengenai pemilihan metode estimasi yang digunakan. Pendapat yang pertama

menyatakan bahwa apabila data yang digunakan dalam penelitian merupakan data populasi yang berarti semua anggota populasi diambil (diobservasi) sebagai data penelitian, maka model ini dapat langsung diestimasi dengan model *fixed effects* tanpa perlu dilakukan pengujian secara statistik. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa meskipun data yang digunakan merupakan data populasi, namun dari sisi *time series* masih terdapat komponen random karena tidak semua periode pengamatan dari masing-masing daerah diobservasi. Sehingga menurut pendapat ini, masih harus tetap dilakukan pengujian secara statistik untuk pemilihan metode estimasi yang digunakan.

Menurut Judge dalam Gujarati (2003) ada 4 pertimbangan yang dapat digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dengan *random effect*, yaitu :

1. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross section* (n) kecil, maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan penghitungan, yaitu model *fixed effects*.
2. Jika komponen *error* u_i individu berkorelasi, maka penaksir dengan model *random effects* adalah bias dan penaksir dengan model *fixed effects* tidak bias.
3. Jika n besar dan T kecil serta asumsi model *random effects* terpenuhi, maka penaksir model *random effects* lebih efisien dari penaksir model *fixed effects*.
4. Bila n besar dan T kecil, maka penaksiran dengan model *fixed effects* dan model *random effects* akan menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada model *random effects* diketahui bahwa $\alpha_i = \alpha + u_i$, dimana u_i merupakan komponen acak *cross section*. Sementara itu, pada model *fixed effects* α_i bersifat tidak acak. Apabila diyakini bahwa individu atau *cross section* tidak acak, maka model *fixed effect* lebih tepat, sebaliknya jika *cross section* acak, maka model *random effect* lebih tepat.

Sedangkan untuk memilih model regresi panel yang tepat secara formal, ada beberapa prosedur pengujian yang akan digunakan, yakni uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* atau model *indivisual effects* dan uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effects* atau model *random effects*. Selanjutnya, untuk model

estimasi regresi data panel terpilih, akan dilakukan pengujian untuk memilih estimator dengan struktur varians-covarians dari residual yang lebih baik. Dalam penelitian ini, model estimasi terbaik akan dipilih dengan uji formal.

4.6.1. Pemilihan Model antara Common Effect dengan Individual Effect

Untuk memilih model estimasi antara common effects dengan individual effects digunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (intersep sama untuk setiap individu/common effects)

$H_1 = \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$ (intersep berbeda untuk setiap individu/individual effects) Adapun uji signifikansinya dilakukan dengan uji F sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{(R_u^2 - R_r^2) / m}{(1 - R_u^2) / (n - k)} \quad (4.8)$$

Dimana :

$R_u^2 = R^2$ dari model individual effects

$R_r^2 = R^2$ dari model common effects

$m =$ jumlah variable yang diretribusi (common effects)

$n =$ jumlah observasi

$k =$ jumlah parameters dalam model individual effects.

Jika F hitung lebih besar dari F table, maka berarti H_0 ditolak dan model yang digunakan adalah model individual effects.

4.6.2. Pemilihan Model antara Fixed Effect dan Random Effect

Untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih baik dari random effect dan sebaliknya, dilakukan pengujian dengan menggunakan *Hausman Test*. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu ditetapkan hipotesis, yaitu :

H_0 : terdapat gangguan antar individu (random effect)

H_1 : tidak ada gangguan antar individu (fixed effect)

Hasil dari Hausman Test dibandingkan dengan nilai chi-square table. Jika nilai W (chi-square test) lebih besar dari chi-square table, maka H_0 ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak terdapat gangguan antar individu, maka model yang harus digunakan adalah *fixed effect*.

4.6.3. Pemilihan Model Estimator dengan melihat Struktur Varian dan Kovarian dari Residual

Untuk memilih struktur varian kovarian dari residual yang lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan uji Langrange Multiplier (LM test) yang berdistribusi Chi-square (χ^2 (DF = n-1; prob=95 %)) dengan formula sebagai berikut :

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\sigma_i^2}{\sigma^2} - 1 \right]^2 \quad (4.9)$$

Dimana :

T = jumlah observasi

N = jumlah individu

σ_i^2 = varians residual persamaan ke-i pada kondisi homokedastik

σ^2 = sum square residual persamaan kondisi homokedastik

Sedangkan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \sigma_i^2 = \sigma^2 \text{ (struktur homokedastik)}$$

$$H_1 = \sigma_i^2 \neq \sigma^2 \text{ (struktur heterokedastik)}$$

H_0 akan ditolak jika nilai LM lebih besar dari nilai χ^2 (DF = n-1; prob=95 %) yang berarti bahwa struktur varians covarian residual bersifat heterokedastik.

4.7 Pengujian Signifikansi

Selanjutnya parameter hasil estimasi dilakukan uji signifikansi secara statistik apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model persamaan regresi melalui uji kesesuaian (R^2), uji secara bersama-sama koefisien regresi (Uji F) maupun pengujian signifikansi koefisien regresi secara parsial (uji t).

1. Uji Kesesuaian (R^2)

Untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi lebih dari 2 variabel, maka perlu dilakukan Uji R^2 . Koefisien R square memberikan gambaran keseluruhan proporsi dalam variable yang dijelaskan oleh variable penjelas secara bersama-sama. R square dihitung dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{ESS}{TSS} \quad (4.10)$$

Besarnya R^2 berada di antara 0 dan 1, jika $R^2 = 1$ artinya bahwa semua variasi dalam variable terikat Y dapat dijelaskan oleh variable-variabel penjelas X yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100%. Jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi dalam variable terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variable-variabel bebas X . Model dikatakan baik jika mendekati R^2 mendekati 1.

2. Uji Secara Serempak (Uji F)

Pengujian secara serempak dilakukan untuk melihat apakah semua variable bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variable yang dijelaskan. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i = 0$ (variable-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variable terikat)

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_i \neq 0$ (variable-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variable terikat)

Untuk mencari F -hitung digunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{(R_u^2 - R_r^2) / m}{(1 - R_u^2) / (n - k)} \quad (4.11)$$

dimana :

$R_u^2 = R^2$ dari model yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki heterokedastisitas dan ada serial korelasi antar error term.

$R_r^2 = R^2$ dari model yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki homokedastisitas dan tidak ada serial korelasi antar error term.

m = jumlah variable yang direstriksi

n = jumlah observasi

k = jumlah parameters dalam model yang tidak direstriksi

Jika F -hitung lebih besar dari F -tabel maka H_0 ditolak, artinya bahwa variable-variable bebas secara bersama-sama mempengaruhi variable terikat.

3. Uji t (Parsial)

Uji parsial dilakukan dengan menggunakan uji t statistic dan dimaksudkan untuk melihat apakah variable-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara individual dapat mempengaruhi variable yang dijelaskan.

Dalam melakukan uji parsial, diajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$ (variable bebas ke-i tidak mempengaruhi variable terikat).

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (variable bebas ke-i mempengaruhi variable terikat).

Sedangkan untuk menentukan daerah kritis dilakukan melalui perbandingan antara t-hitung dengan t tabel, yaitu :

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{S}_j} \quad (4.12)$$

Dimana :

$\hat{\beta}_j$ = koefisien penduga variable ke j

\hat{S}_j = koefisien standar error variable ke j

Jika nilai t hitung lebih besar dari t table, maka H_0 ditolak yang artinya variable bebas ke-i signifikan mempengaruhi variable terikat sedangkan jika t hitung lebih kecil dari t table, maka H_0 diterima yang berarti variable bebas ke-i tidak signifikan mempengaruhi variable terikat.

BAB 5

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil estimasi koefisien parameter variable persamaan regresi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode penelitian. Pada bagian awal akan disajikan hasil uji spesifikasi untuk menentukan model yang terbaik dan hasil uji signifikansi, kemudian pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis pembahasan hasil estimasi penelitian mengenai pengaruh beberapa variable bebas terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pembahasan yang akan disajikan pada bagian ini merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan program software eviews 5.1 dengan data panel yang merupakan gabungan cross section weight 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan data time series dari tahun 2001 sampai dengan 2006.

5.1 Uji Spesifikasi Model

Seperti telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, setiap model panel dapat diestimasi dengan menggunakan model common, fixed effect maupun random effect. Untuk memastikan model mana yang terbaik maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan model estimasi yang terbaik antara individual effect dengan common effect. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan uji F. Dari hasil uji F tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hasil F hitung adalah 328,98 (dapat dilihat pada lampiran 4) yang berarti lebih besar dari nilai F tabel dengan nilai α 1 % yang sebesar 1,77. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 yang menyatakan bahwa intersep untuk semua individu sama (common effect) ditolak. Sehingga hasil tersebut menyimpulkan bahwa model yang dipilih adalah yang menunjukkan adanya efek individu atau model individual effect (intersep untuk setiap kabupaten/kota berbeda).
2. Setelah diperoleh kesimpulan bahwa efek individu adalah model yang sesuai, maka dilakukan uji Hausman untuk memperoleh kesimpulan apakah akan

digunakan fixed effect model ataupun random effect model. Dari hasil pengujian dengan Hausman test (dapat dilihat pada lampiran 5) menghasilkan nilai Chi-square hitung sebesar 70.01 yang berarti lebih tinggi dari nilai Chi-square tabel dengan nilai α 1 % yang sebesar 18.47. Sehingga dengan H_0 yang menyatakan bahwa model adalah random effect, maka secara statistik H_0 tidak dapat diterima, dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa model yang paling baik untuk estimasi adalah model fixed effect.

3. Untuk menentukan estimator terbaik dilakukan dengan melihat struktur varian kovarian dari residual melalui uji LM. Dari hasil uji LM tersebut (dapat dilihat pada lampiran 6) diperoleh nilai LM test adalah 76,15 yang berarti lebih besar dari nilai Chi-square tabel dengan nilai α 1 % yang sebesar 56,06. Sehingga dengan H_0 yang menyatakan bahwa struktur varian kovarian dari residual adalah homokedastik, maka secara statistik H_0 tidak dapat diterima. Artinya metode estimasi yang lebih baik digunakan adalah metode fixed effect dengan struktur varian kovarian heterokedastik.

Dari hasil pengujian pemilihan model estimasi yang terbaik tersebut yaitu efek individu dengan model fixed effect dengan struktur varian kovarian dari residual heterokedastik diperoleh hasil estimasi sebagai berikut :

Tabel 5.1 Hasil Regresi

Variable	Coefficient (Std Error)
C	6.959933 (0.495642)***
LOG(TOTALPP?)	0.006802 (0.003945)*
LOG(KINV?)	0.006493 (0.002978)**
LOG(KMK?)	0.055048 (0.006535)***
LOG(LISTRİK?)	0.233245 (0.017774)***
LOG(AIR?)	0.037085 (0.007861)***
LOG(NAKER?)	0.140614 (0.037851)***
PDDIKN?	0.006218 (0.000914)***
R-squared	0.998932
Adjusted R-squared	0.998672
F-statistic	3833.428
Prob(F-statistic)	0.000000

Keterangan :

- *** = Signifikan pada taraf nyata 1 %
- ** = Signifikan pada taraf nyata 5 %
- * = Signifikan pada taraf nyata 10 %

5.2 Uji Signifikansi dan Arah Pengaruh Variabel-Variabel Bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil uji signifikansi yang telah dilakukan untuk melihat kesesuaian model dan signifikansi dari variabel bebas secara individu maupun bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilihat dari nilai adjusted R-square yang diperoleh dari hasil pengolahan data sebesar 0,9989 menunjukkan bahwa keragaman/variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam persamaan model tersebut sebesar 99,89 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,11 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam

model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan cukup sesuai/representatif.

2. Untuk melihat apakah semua variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan, dapat dilihat dari nilai prob(F-statistic) yang pada tabel 5.1 menunjukkan nilai 0. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,01) yang berarti menunjukkan bahwa variabel total pengeluaran pemerintah, kredit investasi dan modal kerja, ketersediaan jaringan infrastruktur (listrik dan air), tenaga kerja serta pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada nilai $\alpha = 0,01$.
3. Untuk melihat apakah secara individu variabel-variabel bebas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai t statistik atau dari nilai prob (t) seperti terlihat dari tabel 5.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas pada nilai α yang berbeda-beda. Variabel total pengeluaran pemerintah signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada nilai $\alpha = 0,1$ sedangkan variabel realisasi kredit investasi signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada nilai $\alpha = 0,05$ dan variabel-variabel bebas yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada nilai $\alpha = 0,01$ adalah realisasi kredit modal kerja, ketersediaan infrastruktur listrik dan air, jumlah tenaga kerja dan pendidikan. Hubungan antara total pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen total pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,007 persen, ceteris paribus. Hubungan antara realisasi kredit investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, setiap kenaikan 1 persen kredit investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006 persen, ceteris paribus. Hubungan antara realisasi kredit modal kerja dan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, setiap kenaikan 1 persen kredit modal kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen, ceteris paribus. Hubungan antara ketersediaan jaringan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan dimana setiap kenaikan 1 persen kwh energi terjual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23 persen, ceteris

paribus. Demikian juga hubungan antara ketersediaan jaringan air terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, setiap kenaikan 1 persen air bersih yang disalurkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03 persen, ceteris paribus. Hubungan antara jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, setiap kenaikan 1 persen jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 persen, ceteris paribus. Hubungan antara kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan dimana setiap kenaikan 1 satuan (persen) proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/ sederajat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006 persen, ceteris paribus.

5.3 Pembahasan Hasil Estimasi.

5.3.1. Analisis Koefisien Variabel-Variabel Bebas Hasil Estimasi

Dari hasil estimasi yang dilakukan dengan fixed effect, dapat dijelaskan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas seperti terlihat dari tabel 5.1 di atas, hasil estimasi dari model penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} \text{Ln (PDRB)}_{it} &= 6.96 + C_i + 0.007\text{Ln(Total PP)}_{i(t-1)} + 0.006\text{Ln(KInv)}_{i(t-1)} + \\ &0.05\text{Ln(KMK)}_{i(t-1)} + 0.23\text{Ln(Listrik)}_{it} + 0.03\text{Ln(Air)}_{it} + \\ &0.14\text{Ln(Naker)}_{it} + 0.006(\text{Pddikn})_{it} \end{aligned}$$

5.3.1.1. Hubungan Antara Total Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien total pengeluaran pemerintah bernilai positif yaitu sebesar 0,007. Meskipun koefisien regresi cukup kecil, namun pengaruhnya signifikan secara statistik yaitu pada $\alpha = 10$ persen. Karena model yang digunakan adalah double log, sehingga koefisien parameter yang dihasilkan merupakan nilai elastisitas. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara total pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1

persen total pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,007 persen, *ceteris paribus*.

Hubungan yang searah tersebut sejalan dengan perkembangan selama periode penelitian bahwa tingginya tingkat pengeluaran pemerintah akan diikuti oleh tingkat PDRB yang semakin meningkat. Pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,007 persen tersebut, walaupun kecil tapi bisa dikatakan sesuai dengan peranan pemerintah yang tidak lagi menjadi pemegang fungsi utama penggerak perekonomian namun lebih berfungsi sebagai partner dan fasilitator bagi sektor swasta dalam perekonomian.

Selain itu, kecilnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut mungkin juga disebabkan karena sebagian pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk pengeluaran rutin/aparatur untuk keperluan-keperluan seperti gaji pegawai dan belanja alat tulis kantor sehingga sifatnya menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan dan tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang berkaitan langsung dengan pembentukan modal berupa pengeluaran pembangunan/publik juga lebih banyak ditujukan untuk penyediaan sarana publik yang tidak menghasilkan peningkatan output secara langsung seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, irigasi dan sarana publik lainnya. Sehingga akibat yang ditimbulkan karena penggunaan anggaran pembangunan tersebut tidak langsung meningkatkan output perekonomian namun mempunyai pengaruh eksternalitas bagi masyarakat luas dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan output untuk sektor swasta.

5.3.1.2. Hubungan Antara Kredit Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa secara individu koefisien realisasi kredit investasi terhadap pertumbuhan bernilai positif yaitu sebesar 0,006 dengan pengaruhnya signifikan secara statistik yaitu pada $\alpha = 5$ persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara realisasi kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan

signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen nilai realisasi kredit investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah ini menunjukkan bahwa realisasi kredit investasi yang merupakan kredit jangka menengah/panjang yang disalurkan bank umum untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan koefisien regresi yang lebih kecil dari kredit modal kerja mungkin disebabkan karena kredit investasi sifatnya merupakan investasi jangka menengah atau panjang yang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlalu besar pada tahun berikutnya. Artinya pengaruh pertumbuhan realisasi kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diukur melalui pendekatan jangka pendek dalam satu tahun berikutnya masih belum terlalu besar pengaruhnya karena tidak dapat secara langsung meningkatkan produksi ataupun jasa yang diberikan, akan tetapi memerlukan proses yang lebih lama.

5.3.1.3. Hubungan Antara Kredit Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien realisasi kredit modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai positif yaitu sebesar 0,05 dengan pengaruhnya signifikan secara statistik yaitu pada $\alpha = 1$ persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara realisasi kredit modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen nilai realisasi kredit modal kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah tersebut menunjukkan bahwa realisasi kredit modal kerja yang merupakan kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja yang disalurkan melalui perbankan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena kredit modal kerja tersebut akan digunakan oleh para peminjam untuk meningkatkan produksi ataupun memperluas usaha yang telah dijalankan. Sehingga dengan adanya peningkatan realisasi terhadap kredit untuk keperluan modal kerja tersebut diharapkan akan

meningkatkan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Hubungan yang searah tersebut juga sejalan dengan perkembangan selama periode penelitian bahwa tingginya realisasi kredit modal kerja diikuti oleh tingkat PDRB yang semakin meningkat.

5.3.1.4. Hubungan Antara Ketersediaan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien ketersediaan infrastruktur (jaringan listrik dan air bersih) yang didekati dengan energi listrik yang terjual dan besarnya aliran air bersih yang disalurkan bernilai positif yaitu sebesar 0,23 dan 0,03 dengan pengaruh yang signifikan secara statistik yaitu pada $\alpha = 1$ persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ketersediaan jaringan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen jaringan listrik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23 persen, ceteris paribus dan setiap kenaikan 1 persen jaringan air bersih akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah antara ketersediaan jaringan listrik dan air tersebut sejalan dengan perkembangan selama periode penelitian yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan propinsi dengan sebaran usaha industri yang paling besar di antara propinsi lain di Indonesia. Data menunjukkan bahwa perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Tengah pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3.544 unit perusahaan dan terdapat 644.002 perusahaan industri kecil dan menengah. Dimana industri yang berkembang tersebut dalam melakukan proses produksi dan usahanya menggunakan energi listrik (PLN) dan juga jaringan air bersih (PDAM). Selama periode 2000-2006 tercatat bahwa rata-rata energi listrik yang terjual (PLN) digunakan oleh kelompok industri dan usaha sebesar 44,25 persen dari total secara keseluruhan.

Sehingga dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik dan air tersebut menjadi sangat penting bagi perkembangan industri dan unit usaha di Jawa Tengah karena akan dapat memperlancar proses produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

5.3.1.5. Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi dengan menggunakan estimasi fixed effect pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan yaitu sebesar 0,14 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang didekati dengan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan pekerjaan utama, tentu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja produktif maka diharapkan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga produksi/output yang dihasilkan juga meningkat yang berarti akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penambahan jumlah tenaga kerja berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki pendapatan berarti akan memperluas pasar karena dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki pendapatan berarti akan menimbulkan kenaikan permintaan. Hal ini akan memacu tingkat kegiatan ekonomi untuk dapat lebih meningkatkan produksi, yang pada akhirnya akan menjadi faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini juga membuktikan bahwa hasil penelitian Baffers dan Syah (1998) dan Hariyati (2007) masih tetap relevan untuk melihat pengaruh pertumbuhan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hasil penelitian tersebut juga menemukan terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

Selama periode penelitian jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan kerja utama terus meningkat. Dimana jumlah pekerja tertinggi selama periode penelitian adalah pada tahun 2005 sebesar 15.655.303 pekerja dan paling rendah pada tahun 2002 sebesar 14.491.222 pekerja. Hal ini juga sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga tercatat mencapai angka tertinggi pada tahun 2005 sebesar 5,35 persen dan terendah pada tahun 2002 sebesar 3,55 persen.

5.3.1.6. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi dengan menggunakan estimasi fixed effect pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan yaitu sebesar 0,006 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan (persen) persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berpendidikan minimal SMA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006 persen ceteris paribus.

Hubungan yang positif dan signifikan antara bertambahnya angkatan kerja yang berpendidikan minimal SMA dengan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena dengan semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif. Selain itu pendidikan juga dapat merubah sikap seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti sikap mudah menerima, berorientasi ke masa depan dan selalu berusaha mencapai sasaran yang lebih baik, meningkatkan keahlian serta ketrampilan baru, baik di bidang-bidang profesional maupun keahlian berorganisasi. Dengan adanya perubahan sikap tersebut maka akan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan diharapkan akan meningkatkan produksi/output yang dihasilkan serta peningkatan pendapatan yang berarti akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi.

5.3.2. Analisis Efek Individu Kabupaten/Kota

Karena penelitian ini mengestimasi dengan menggunakan model fixed effect, maka memungkinkan adanya analisis efek individu dari setiap kabupaten/kota, yang dapat diartikan sebagai posisi potensi relatif suatu kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota lainnya. Karena efek individu merupakan cerminan dari variable yang tidak terobservasi, maka untuk menganalisisnya (dalam kerangka fixed effect) adalah dengan mengelaborasi variable yang tidak dimasukkan dalam model tetapi masih memiliki korelasi dengan variable-variabel bebas dalam model. (Wooldridge, 2002)

Efek individu yang dihasilkan oleh model fixed effect merupakan gambaran adanya heterogenitas setiap daerah yang mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain.

Atau dengan kalimat lain daerah tersebut memiliki keunggulan atau posisi potensi relatif suatu kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota lainnya dalam variable lain di luar variable bebas yang digunakan dalam model. Apabila diasumsikan variable-variabel bebas tidak mengalami perubahan, maka masing-masing kabupaten/kota akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda karena determinan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah hanya akan tergantung dari efek individunya yaitu dari nilai konstanta (intersep) ditambah dengan fixed effect (heterogenitas antar daerah).

Hal ini mencerminkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga kemampuan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota juga berbeda-beda. Walaupun demikian secara keseluruhan heterogenitas antara kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak terlalu berbeda/bervariasi. Berikut ini efek individu masing-masing kabupaten/kota yang menunjukkan posisi relatif masing-masing kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota lainnya :

Tabel 5.2 Efek Individu Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	INTERSEP	FIXED EFFECT	EFEK INDIVIDU KAB/KOTA
Kab. Cilacap	6.959933	0.987999	7.947932
Kab. Banyumas	6.959933	0.049941	7.009874
Kab. Purbalingga	6.959933	-0.16339	6.796543
Kab. Banjarnegara	6.959933	0.074936	7.034869
.....
Kab. Kudus	6.959933	1.048053	8.007986
Kab. Jepara	6.959933	0.180981	7.140914
Kab. Demak	6.959933	0.007549	6.967482
Kab. Semarang	6.959933	0.222788	7.182721
Kab. Temanggung	6.959933	-0.18695	6.772979
.....
Kota Salatiga	6.959933	-1.17543	5.784505
Kota Semarang	6.959933	0.832398	7.792331
Kota Pekalongan	6.959933	-0.26054	6.699398
Kota Tegal	6.959933	-0.81284	6.147095

Keterangan : selengkapnya terdapat dalam lampiran 7

Berdasarkan hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mempunyai efek individu yang paling tinggi, relatif terhadap daerah lain. Hal ini

bisa diartikan bahwa terdapat variable lain yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus di luar variable bebas di dalam model yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain sebesar 8,008 (*ceteris paribus*).

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di luar variable bebas yang ada antara lain adalah banyaknya jumlah industri menengah dan besar yang ada di Kabupaten Kudus terutama industri pengolahan rokok dan tembakau serta kertas yang tidak terdapat di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Faktor banyaknya industri yang banyak berkembang di Kudus ini akan menimbulkan efek tumpahan bagi proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerjanya serta memicu pola pikir yang lebih maju. Sehingga dengan tenaga kerja yang lebih berpengetahuan dan mengerti teknologi akan meningkatkan ketrampilan dan produktifitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Sedangkan apabila dilakukan pengelompokan antara daerah pesisir dengan daerah non-pesisir, dapat terlihat bahwa efek individu antara keduanya tidak terdapat perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari uji perbandingan angka rata-rata (*mean*) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara angka rata-rata daerah pesisir dengan daerah non pesisir.¹ Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara kabupaten/kota daerah pesisir dengan kabupaten/kota daerah non-pesisir tidak terdapat heterogenitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

¹ Perhitungan tentang uji angka rata-rata dapat dilihat dalam lampiran 8

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan beberapa variable bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode penelitian. Pada bagian awal akan disajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan pada bagian selanjutnya berdasarkan dari kesimpulan yang telah dihasilkan akan disajikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang ada bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori penawaran aggregate (AD) dan IS-LM serta beberapa teori pertumbuhan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengujian statistik yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan model estimasi fixed effect dengan struktur varian covarian dari residual heterokedastik.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama periode penelitian yaitu tahun 2001-2006 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode penelitian, total pengeluaran pemerintah kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Walaupun dengan pengaruh yang tidak terlalu besar, hal ini sejalan dengan peran pemerintah yang tidak lagi menjadi pemegang fungsi utama penggerak perekonomian namun lebih berfungsi sebagai partner dan fasilitator bagi sektor swasta dalam perekonomian.
2. Realisasi kredit investasi yang merupakan kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru dan modal kerja yang merupakan kredit jangka pendek yang

disalurkan melalui perbankan yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai positif, artinya kredit investasi dan modal kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Ketersediaan infrastruktur (jaringan listrik dan air bersih) yang didekati dengan energi listrik yang terjangkau dan besarnya air bersih yang disalurkan adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan listrik dan air menjadi sangat penting bagi perkembangan industri dan unit usaha di Jawa Tengah karena akan dapat memperlancar proses produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Hubungan yang positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif yang akan meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Faktor kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang positif dan signifikan antara bertambahnya prosentase angkatan kerja yang berpendidikan minimal SMA dengan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena dengan semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif.
6. Efek individu yang dihasilkan oleh model fixed effect merupakan gambaran dari heterogenitas setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Dengan kata lain, daerah tersebut memiliki keunggulan dalam variable lain di luar variable bebas yang digunakan dalam model. Namun demikian, secara keseluruhan perbedaan efek individu kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut tidak terlalu berbeda. Demikian juga apabila dikelompokkan antara kabupaten/kota daerah pesisir dengan kabupaten/kota daerah non-pesisir juga tidak terdapat heterogenitas antar daerah.

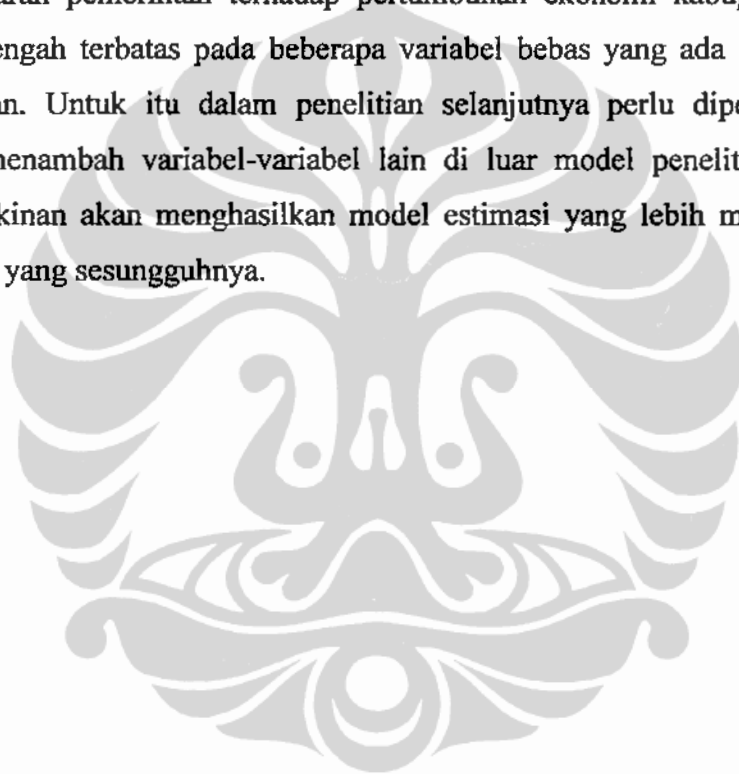
6.2 Rekomendasi Kebijakan.

1. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah seharusnya lebih mengefektifkan lagi penggunaan pengeluaran pemerintah dengan cara mengalokasikan dana APBD lebih besar ke sektor-sektor yang secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi lokal yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana APBD tersebut untuk keperluan pembangunan/publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, penguatan ekonomi lokal dan sekaligus berupaya membuat birokrasi pemerintah yang lebih efisien agar pengeluaran yang diperuntukkan bagi aparatur dan kegiatan rutin dapat dikurangi. Selain itu perlu diupayakan juga peningkatan fungsi kontrol masyarakat terhadap penggunaan belanja pemerintah daerah untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan korupsi.
2. Selain mengupayakan peningkatan alokasi untuk pengeluaran pembangunan/publik, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menjalankan peranannya sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi dunia industri dan usaha untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak terkait (PLN dan PDAM) dalam menyediakan ketersediaan infrastruktur baik berupa jaringan listrik dan air yang akan mendorong adanya investasi ke daerahnya sehingga mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja produktif yang akan lebih cepat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerahnya.
3. Kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan pihak perbankan perlu dilakukan secara intensif dengan kerangka kerjasama yang konstruktif dalam mengatur proses pencairan kredit investasi dan modal kerja dengan tetap berhati-hati agar dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan dengan lebih banyak lagi mengalokasikan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan agar kualitas sumber daya manusia di kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat lebih meningkat. Dengan kualitas sumber daya yang meningkat maka akan

bertambah tenaga kerja yang mempunyai kualitas yang baik sehingga diharapkan tingkat produktivitasnya akan lebih baik dari sebelumnya.

6.3 Keterbatasan Studi

1. Data yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga mungkin kurang secara tepat menggambarkan kondisi variabel sesungguhnya.
2. Dalam penelitian ini model estimasi yang digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah terbatas pada beberapa variabel bebas yang ada dalam model penelitian. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk menambah variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang kemungkinan akan menghasilkan model estimasi yang lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.



DAFTAR REFERENSI

- Ananta, Aris. (1990). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2006). *Jawa Tengah dalam Angka*, BPS, Jawa Tengah.
- Baffes, J. dan A. Shah, (1998). *Productivity of Public Spending, Sectoral Allocation Choices, and Economic Development*. *Economic and Cultural Change*. 46 (2) : 291-303.
- Baltagi, Badi H. (2001). *Econometric Analysis of Panel Data, Second Edition*. England : John Wiley & Sons, Ltd.
- Bappenas. (2007). *Pembangunan Daerah dalam Angka 2006*. Jakarta : Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- Barata, Atep Adya dan Trihartanto, Bambang. (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Kelompok Kompas-Gramedia, Jakarta.
- Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth . *Journal of Political Economy*. 98(5). 103-125.
- Devarajan, Shantayanan, Swaroop, Vinaya, Zou, Hengfu. (1993). *The Compotition Public Expenditure and Economic Growth*. *Journal of Monetary Economic*.
- Effendi, Haris; *Pengaruh Perubahan Pengeluaran Pemerintah terhadap Perubahan PDB Indonesia 1973-2004*. (2006). Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ekananda, Mahyus. (2008). *Bahan Kuliah Ekonometri: Estimasi menggunakan Data Panel*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Greene, H. 2005. *Econometric Analysis 4th Edition*. USA: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. Fourth Edition. Singapore : McGraw Hill Companies.
- Gunerson, Morley. (1993). *Labour Market Economic*. San Francisco: McGraw-Hill.
- Gupta, K.L. (1988). *Macroeconomics Determinant of Growth : Some Implications of Disaggregation*. *Applied Economics Journal*. 20 (6). 843-52.

- Gupta, S. B. Clements, E. Baldacci dan C Mulas-Granados. (2002). *Expenditure Composition, Fiscal Adjustment and Growth*. IMF Working Paper 02/77.
- Hariyati, Wuri; *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Propinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia selama 1993-2005*. (2007). Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kweka dan Josaphat P. (2000). *Government Spending and Economic Growth in Tanzania (1965-1996)*. Centre for Research in Economic Development and International Trade (CREDIT) Research Paper No. 00/6. Nottingham, UK. University of Nottingham, School of Economics.
- Lamazti. (2002). *Pengaruh Modal Manusia terhadap Penghasilan Keluarga Petani Desa Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III MUBA*. Universitas Sriwijaya. Kajian Ekonomi Vol. 1 No. 1. hal: 84-106.
- Landau, Daniel. (1986). *Government and Economics Growth in the Less Developed Countries : An Empirical Study or 1960-1980*. Economic and Cultural Change. 35. 35-75.
- Lin, S.A.Y. (1994). *Government Spending and Economic Growth*. Applied Economics. 26 (1). 83-94.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1999). *Ekonomi Publik*. Edisi 3, Yogyakarta : BPFE.
- Mankiw, Gregory. (2007). *Macroeconomics (6th ed)*, (Fitria Liza dan Imam Nurmawan, Penerjemah). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N.G, Romer D. dan Weil, D.N. (1990). A Contribution to The Empirics of Economic Growth. NBER Working Papers Series No. 3541. National Bureau of conomic Research, Massachusetts Avenue, Cambridge.
- Manurung, Jonni J dkk. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurdjaman, Arsjad, Kusumanto, Bambang dan Yuwono, Prawiroseto. (1992). *Keuangan Negara*. Jakarta : Intermedia.
- Propinsi Jawa Tengah. (2001). Program Pembangunan Daerah Propinsi Jateng 2001-2005.
- Pyndick, Robert S and Daniel L. Rubinfeld. (1998). *Econometric Models and Economic Forecast*. New York : McGraw-Hill International.

- Ram, Rati. (1986). *Government Size and Economics Growth : A New Framework and Some Evidence from Cross Section and Time Series Data*. American Economis Review, 76(1). 191-203.
- Romer, David. (2006). *Advanced Macroeconomics*, 3rd Edition. New York : McGraw-Hill Companies, Inc.
- Samuelson, Paul A dan William D Nordhaus. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. (Greta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, Anna Elly, Penerjemah). Edisi tujuh belas. Jakarta : PT. Media Global Edukasi.
- Setiati, Ira. (1996). *Pengaruh Penggunaan Variabel Demografi dalam Model Pertumbuhan Ekonomi Kasus 25 Propinsi di Indonesia, 1983-1992*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol XLIV No. 2.
- Sukirno, Sadono. (1994). *Pengantar Teori Makroekonomi*; Edisi Ketiga; Jakarta; PT Raja Grafindo Perkasa.
- Supriadi, Dedi. (1992). *Peranan Migrasi dan Mutu Modal Manusia dalam Pembangunan: Studi Kasus di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wooldridge, J. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge: MIT Press.

Lampiran 1 :
Hasil Estimasi dengan Model *Common Effects*

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/17/08 Time: 13:25
Sample: 2001 2006
Included observations: 6
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.527715	0.784746	-1.946765	0.0529
LOG(TOTALPP?)	-0.040660	0.032550	-1.249141	0.2131
LOG(KINV?)	-0.040554	0.018800	-2.157122	0.0322
LOG(KMK?)	0.292623	0.030570	9.572154	0.0000
LOG(LISTRİK?)	0.420344	0.044147	9.521564	0.0000
LOG(AIR?)	0.019040	0.028505	0.667958	0.5049
LOG(NAKER?)	0.439868	0.048045	9.155349	0.0000
PDDIKN?	-0.005134	0.003399	-1.510487	0.1325
R-squared	0.870922	Mean dependent var	14.79917	
Adjusted R-squared	0.866449	S.D. dependent var	0.628063	
S.E. of regression	0.229523	Akaike info criterion	-0.068275	
Sum squared resid	10.64154	Schwarz criterion	0.059234	
Log likelihood	15.16884	F-statistic	194.7070	
Durbin-Watson stat	0.165618	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 2 :
Hasil Estimasi dengan Model *Random Effects*

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/17/08 Time: 13:29
 Sample: 2001 2006
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.219356	0.582252	7.246609	0.0000
LOG(TOTALPP?)	0.008636	0.005901	1.463448	0.1449
LOG(KINV?)	0.003801	0.004145	0.917112	0.3602
LOG(KMK?)	0.068699	0.008821	7.788294	0.0000
LOG(LISTRIK?)	0.235030	0.022976	10.22936	0.0000
LOG(AIR?)	0.024641	0.009885	2.492833	0.0135
LOG(NAKER?)	0.354355	0.042239	8.389352	0.0000
PDDIKN?	0.005103	0.001199	4.255927	0.0000
Random Effects (Cross)				
_CILACAP--C	0.857240			
_BANYUMAS--C	-0.062791			
_PURBALINGGA--C	-0.166174			
_BANJARNEGARA--C	0.043489			
_KEBUMEN--C	-0.148206			
_PURWOREJO--C	0.010079			
_WONOSOBO--C	-0.328998			
_MAGELANG--C	0.068491			
_BOYOLALI--C	0.167777			
_KLATEN--C	0.105906			
_SUKOHARJO--C	0.120075			
_WONOGIRI--C	-0.110302			
_KARANGANYAR--C	0.060727			
_SRAGEN--C	-0.331596			
_GROBOGAN--C	-0.222216			
_BLORA--C	-0.311683			
_REMBANG--C	0.027393			
_PATI--C	0.056425			
_KUDUS--C	1.010005			
_JEPARA--C	0.114469			
_DEMAK--C	-0.039952			
_SEMARANG--C	0.167930			
_TEMANGGUNG--C	-0.180657			
_KENDAL--C	0.205059			
_BATANG--C	-0.095879			

(Lanjutan)

_PEKALONGAN--C	0.036676
_PEMALANG--C	-0.047765
_TEGAL--C	-0.081867
_BREBES--C	0.179879
_KOTAMAGELANG--C	-0.521391
_KOTASURAKARTA--C	-0.051883
_KOTASALATIGA--C	-0.769146
_KOTASEMARANG--C	0.753191
_KOTAPEKALONGAN--C	0.008588
_KOTATEGAL--C	-0.522892

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.228316	0.9823
Idiosyncratic random		0.030611	0.0177
Weighted Statistics			
R-squared	0.799108	Mean dependent var	0.808835
Adjusted R-squared	0.792146	S.D. dependent var	0.076907
S.E. of regression	0.035062	Sum squared resid	0.248334
F-statistic	114.7876	Durbin-Watson stat	1.108039
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.695527	Mean dependent var	14.79917
Sum squared resid	25.10164	Durbin-Watson stat	0.010962

Lampiran 3 :
Hasil Estimasi dengan Model *Fixed Effects*

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/17/08 Time: 13:30
 Sample: 2001 2006
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.147215	0.737298	9.693790	0.0000
LOG(TOTALPP?)	0.010827	0.005978	1.811085	0.0719
LOG(KINV?)	0.003410	0.004161	0.819593	0.4136
LOG(KMK?)	0.066708	0.008892	7.501966	0.0000
LOG(LISTRİK?)	0.225227	0.023704	9.501767	0.0000
LOG(AIR?)	0.028079	0.010020	2.802425	0.0057
LOG(NAKER?)	0.133997	0.056714	2.362677	0.0193
PDDIKN?	0.006443	0.001241	5.190962	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	1.003496			
_BANYUMAS--C	0.062441			
_PURBALINGGA--C	-0.164397			
_BANJARNEGARA--C	0.068341			
_KEBUMEN--C	-0.079998			
_PURWOREJO--C	-0.017980			
_WONOSOBO--C	-0.327008			
_MAGELANG--C	0.155377			
_BOYOLALI--C	0.227613			
_KLATEN--C	0.187320			
_SUKOHARJO--C	0.128396			
_WONOGIRI--C	-0.030822			
_KARANGANYAR--C	0.088050			
_SRAGEN--C	-0.295255			
_GROBOGAN--C	-0.094570			
_BLORA--C	-0.280231			
_REMBANG--C	-0.041312			
_PATI--C	0.160567			
_KUDUS--C	1.023050			
_JEPARA--C	0.177953			
_DEMAK--C	0.010099			
_SEMARANG--C	0.227247			
_TEMANGGUNG--C	-0.182617			
_KENDAL--C	0.242870			
_BATANG--C	-0.131121			

(Lanjutan)

_PEKALONGAN--C	0.057177
_PEMALANG--C	0.051763
_TEGAL--C	0.026601
_BREBES--C	0.358094
_KOTAMAGELANG--C	-0.997178
_KOTASURAKARTA--C	-0.191321
_KOTASALATIGA--C	-1.174122
_KOTASEMARANG--C	0.844306
_KOTAPEKALONGAN--C	-0.272164
_KOTATEGAL--C	-0.820662

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998090	Mean dependent var	14.79917
Adjusted R-squared	0.997624	S.D. dependent var	0.628063
S.E. of regression	0.030611	Akaike info criterion	-3.958029
Sum squared resid	0.157426	Schwarz criterion	-3.288607
Log likelihood	457.5930	F-statistic	2141.764
Durbin-Watson stat	1.397151	Prob(F-statistic)	0.000000

Pengujian Signifikansi

$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (intersep sama untuk setiap individu/common effects)

$H_1 = \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$ (intersep berbeda untuk setiap individu/individual effects).

Adapun uji signifikansinya dilakukan dengan uji F sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{(R_u^2 - R_r^2)/m}{(1 - R_u^2)/(n - k)}$$

Dimana :

$R_u^2 = R^2$ dari model individual effects

$R_r^2 = R^2$ dari model common effects

m = jumlah variable yang diretribusi (common effects)

n = jumlah observasi

k = jumlah parameters dalam model individual effects.

Hasil perhitungan :

$$F_{hitung} = \frac{((0,99809 - 0,870922)/34)}{((1 - 0,99809)/(210 - 42))}$$
$$= 328,98$$

Nilai kritis : $F_{(0,01;34;168)} = 1,77$

Keputusan : Tolak H_0

Kesimpulan : Pada $\alpha = 1\%$, model yang digunakan adalah model individual effects.

Lampiran 5 :
 Hasil Uji Hausman (Fixed Effect atau Random Effect)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL1

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	70.013832	7	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(TOTALPP?)	0.010827	0.008636	0.000001	0.0218
LOG(KINV?)	0.003410	0.003801	0.000000	0.2813
LOG(KMK?)	0.066708	0.068699	0.000001	0.0763
LOG(LISTRİK?)	0.225227	0.235030	0.000034	0.0926
LOG(AIR?)	0.028079	0.024641	0.000003	0.0359
LOG(NAKER?)	0.133997	0.354355	0.001432	0.0000
PDDIKN?	0.006443	0.005103	0.000000	0.0000

Signifikansi Hausman

H_0 : model *random effects* lebih baik dari pada model *fixed effects*

H_1 : model *fixed effects* lebih baik dari pada model *random effects*

Wilayah kritis : $\chi^2_{(0,01;7)} = 18,47$

Nilai χ^2 hitung = 70,01

Keputusan : Tolak H_0

Kesimpulan : Pada $\alpha = 1\%$, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode *fixed effects*.

Lampiran 6 :
Hasil Uji LM (Struktur var-cov residual homokedastik atau heterokedastik)

Uji Langrange Multiplier (LM test) yang berdistribusi Chi-square (χ^2 (DF = n-1; prob=95 %)) dengan formula sebagai berikut :

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\sigma_i^2}{\sigma^2} - 1 \right]^2$$

Sedangkan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \sigma_i^2 = \sigma^2 \text{ (struktur homokedastik)}$$

$$H_1 = \sigma_i^2 \neq \sigma^2 \text{ (struktur heterokedastik)}$$

Nilai LM = 76.15

Wilayah kritis $\chi^2_{(0.01;34)} = 56.06$

Keputusan : Tolak H_0

Kesimpulan : Pada $\alpha = 1\%$, estimator yang tepat untuk regresi data panel adalah dengan struktur varians kovarian residual bersifat heterokedastik.

Lampiran 7 :
 Hasil Estimasi *Fixed Effects* dengan *Cross Section Weights*

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 08/17/08 Time: 13:33
 Sample: 2001 2006
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.959933	0.495642	14.04225	0.0000
LOG(TOTALPP?)	0.006802	0.003945	1.724154	0.0865
LOG(KINV?)	0.006493	0.002978	2.180599	0.0306
LOG(KMK?)	0.055048	0.006535	8.423430	0.0000
LOG(LISTRİK?)	0.233245	0.017774	13.12304	0.0000
LOG(AIR?)	0.037085	0.007861	4.717722	0.0000
LOG(NAKER?)	0.140614	0.037851	3.714913	0.0003
PDDIKN?	0.006218	0.000914	6.805920	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	0.987999			
_BANYUMAS--C	0.049941			
_PURBALINGGA--C	-0.163390			
_BANJARNEGARA--C	0.074936			
_KEBUMEN--C	-0.083009			
_PURWOREJO--C	-0.019830			
_WONOSOBO--C	-0.347714			
_MAGELANG--C	0.159120			
_BOYOLALI--C	0.228280			
_KLATEN--C	0.186999			
_SUKOHARJO--C	0.137762			
_WONOGIRI--C	-0.032107			
_KARANGANYAR--C	0.086663			
_SRAGEN--C	-0.300479			
_GROBOGAN--C	-0.090900			
_BLORA--C	-0.273035			
_REMBANG--C	-0.037566			
_PATI--C	0.164522			
_KUDUS--C	1.048053			
_JEPARA--C	0.180981			
_DEMAK--C	0.007549			
_SEMARANG--C	0.222788			
_TEMANGGUNG--C	-0.186954			
_KENDAL--C	0.227894			
_BATANG--C	-0.126706			

(Lanjutan)

_PEKALONGAN--C	0.067890
_PEMALANG--C	0.051718
_TEGAL--C	0.025899
_BREBES--C	0.351889
_KOTAMAGELANG--C	-0.990523
_KOTASURAKARTA--C	-0.192269
_KOTASALATIGA--C	-1.175428
_KOTASEMARANG--C	0.832398
_KOTAPEKALONGAN--C	-0.260535
_KOTATEGAL--C	-0.812838

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.998932	Mean dependent var	20.00580
Adjusted R-squared	0.998672	S.D. dependent var	8.858529
S.E. of regression	0.029862	Sum squared resid	0.149807
F-statistic	3833.424	Durbin-Watson stat	1.565324
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.998848	Mean dependent var	14.79917
Sum squared resid	0.161654	Durbin-Watson stat	1.320453

Lampiran 8

Hasil uji angka rata-rata (mean) antara daerah pesisir dengan non pesisir

Group Statistics

Kategori	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Data pesisir	17	17643817.9623	22627438.57052	5487959.95667
non pesisir	18	13606536.9502	22505476.83213	5304591.76061

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Upper	Lower	
Data	Equal variances assumed	.336	.566	.529	33	.600	4037281.0	7631373.7	-11488865.5	19563427.5
	Equal variances not assumed			.529	32.8	.600	4037281.0	7632587.9	-11493775.4	19568337.5